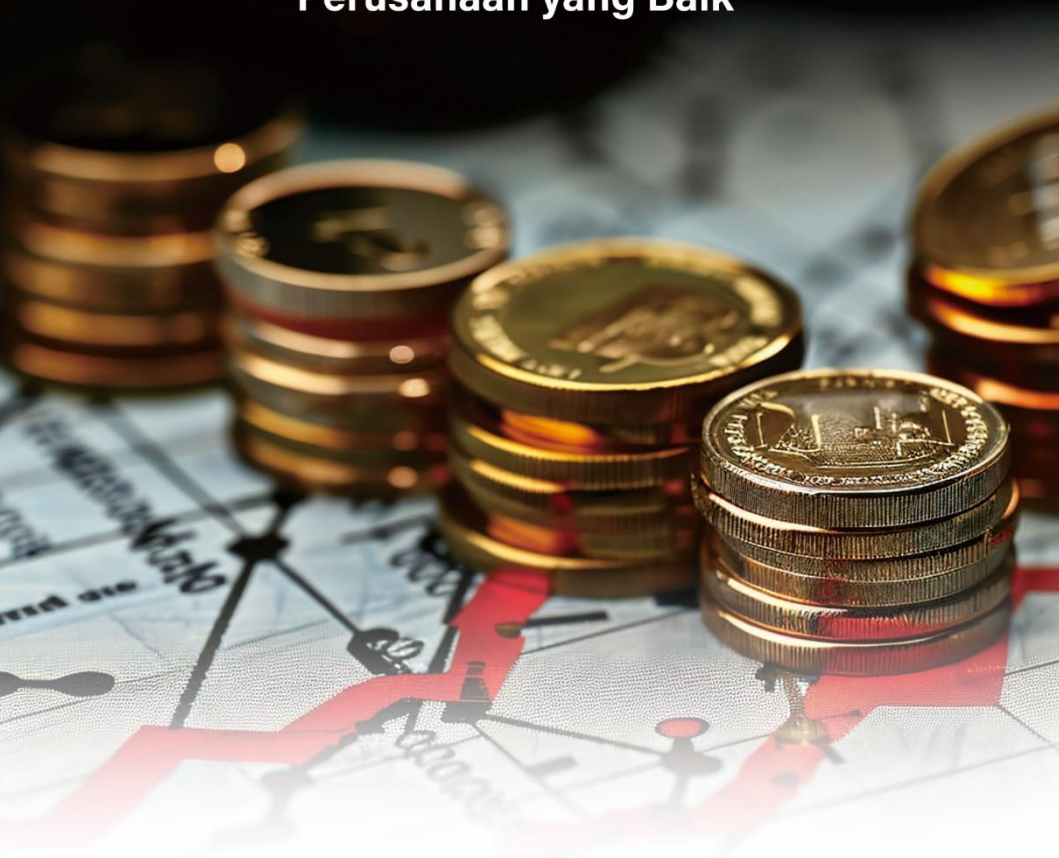


Dr. Drs. Gaguk Apriyanto, M.Si. | Prof. Dr. Fajar Supanto, M.S.
Dr. Ilham Z Sale, S.E., M.S.Ak. | Prof. Dr. Boge Tri Atmanto, M.M.
Dr. Syarif Hidayatullah, S.E., M.M. | Dr. Harmono, S.E., M.Si.
Sufiyanto, S.T., M.T. | Dr. Sari Yuniarti, S.E., M.M.
Moh. Fahrial Amrulla S.H., M.H.

EKONOMI POLITIK AKUNTANSI

**Fondasi untuk Tata Kelola
Perusahaan yang Baik**



EKONOMI POLITIK AKUNTANSI

Fondasi untuk Tata Kelola Perusahaan
yang Baik ●

- Dr. Drs. Gaguk Apriyanto, M.Si.
- Prof. Dr. Fajar Supanto, M.S.
- Dr. Ilham Z. Sale, S.E., M.S.Ak.
- Prof. Dr. Boge Tri Atmanto, M.M.
- Dr. Syarif Hidayatullah, S.E., M.M.
- Dr. Harmono, S.E., M.Si.
- Sufiyanto, S.T., M.T.
- Dr. Sari Yuniarti, S.E., M.M.
- Moh. Fahrial Amrulla, S.H., M.H.

PENERBIT KBM INDONESIA



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

PENERBIT KBM INDONESIA Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

EKONOMI POLITIK AKUNTANSI:

Fondasi untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Copyright @2024 by Dr. Drs. Gaguk Apriyanto, M.si., dkk.

All rights reserved

ISBN | 978-634-202-029-6

14 x 21 cm vi + 167 halaman

Cetakan ke-1, November 2024

Penulis | Dr. Drs. Gaguk Apriyanto, M.Si.

Prof. Dr. Fajar Supanto, M.S.

Dr. Ilham Z. Sale, S.E., M.S.Ak.

Prof. Dr. Boge Tri Atmanto, M.M.

Dr. Syarif Hidayatullah, S.E., M.M.

Dr. Harmono, S.E., M.Si.

Sufiyanto, S.T., M.T.

Dr. Sari Yuniarti, S.E., M.M.

Moh. Fahrial Amrulla, S.H., M.H.

Desain Sampul | Aswan Kreatif

Tata Letak | Idzmah U.

Editor | Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Diterbitkan Oleh:

PENERBIT KBM INDONESIA

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

NO. IKAPI 279/JTI/2021

Depok, Sleman-Jogjakarta

081357517526 (Tlpn/WA)

Website | penerbitkbm.com | www.penerbitbukumurah.com

Email | naskah@penerbitkbm.com | toko.penerbitbukujogja.com

Youtube | Penerbit KBM Sastrabook

Instagram | [@penerbit.kbm](https://www.instagram.com/penerbit.kbm) | [@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

Isi Buku Diluar Tanggungjawab Penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

KATA PENGANTAR



PUJI syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku yang berjudul *Ekonomi Politik Akuntansi: Fondasi untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik* ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara ekonomi politik dan praktik akuntansi dalam konteks tata kelola perusahaan.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan dalam dunia bisnis semakin kompleks. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mencapai keuntungan, tetapi juga mempertanggungjawabkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengelolaan perusahaan yang baik.

Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi politik dapat dijadikan fondasi dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik. Kami berusaha mengintegrasikan

teori dan praktik yang relevan, serta memberikan contoh-contoh konkret yang dapat diimplementasikan oleh praktisi, akademisi, dan mahasiswa.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memahami pentingnya akuntansi dan tata kelola perusahaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai ekonomi politik akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik.

INDONESIA

www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
BAB 1 - PENGANTAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE ---	1
1.1 Definisi Good Corporate Governance-----	1
1.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance -----	7
1.3 Relevansi Good Corporate Governance di Era Digital-----	10
BAB 2 - DIGITALISASI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE -----	15
2.1 Konsep Digitalisasi -----	15
2.2 Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi-----	19
2.3 Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan-----	23
BAB 3 - POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING -----	31
3.1 Ekonomi Neo-klasik-----	32
3.2 Kritik atas Konsep Ekonomi Neo-klasik -----	36
3.3 Ekonomi Politik Klasik: Pijakan Teori PEA -----	42
3.4 Political Economy of Accounting (PEA) dalam Konteks Analisis Laba (Rugi) -----	46
3.5 Road Map Kajian PEA -----	58

BAB 4 - FINANCIAL FRAUD: PENYEBAB DAN DAMPAK -----	59
4.1 Definisi Financial Fraud -----	59
4.2 Tipe-tipe Financial Fraud -----	65
4.3 Kasus Nyata Financial Fraud dan Pembelajaran -----	72
BAB 5 - FORMULASI DIGITALISASI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE -----	77
5.1 Model Formulasi Digitalisasi -----	77
5.2 Strategi Implementasi Digitalisasi -----	80
5.3 Studi Kasus: Perusahaan yang Berhasil -----	84
BAB 6 - MENCEGAH FINANCIAL FRAUD MELALUI DIGITALISASI -----	89
6.1 Teknologi untuk Deteksi Dini Fraud -----	89
6.2 Penggunaan Big Data dan AI -----	96
6.3 Pembinaan dan Edukasi untuk Karyawan -----	100
6.4 Formulasi Digitalisasi Good Corporate Governance berbasis Political Economy of Accounting untuk Mencegah Financial Fraud -----	103
BAB 7 - MENCAPAI ENVIRONMENTAL EXCELLENCY -----	117
7.1 Konsep Environmental Excellency -----	117
7.2 Good Corporate Governance dalam Konteks Lingkungan -----	121
7.3 Studi Kasus: Perusahaan yang Berkelanjutan -----	125
7.4 Formulasi Digitalisasi Good Corporate Governance Berbasis Political Economy Of Accounting Untuk Mencapai Enviromental Excellency -----	129
BAB 8 - INTEGRASI DIGITALISASI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN LINGKUNGAN -----	143
8.1 Sinergi antara Digitalisasi dan Good Corporate Governance -----	143



8.2 Rekomendasi untuk Kebijakan Publik-----	147
8.3 Masa Depan Good Corporate Governance dalam Era Digital -----	150
DAFTAR PUSTAKA -----	155
PROFIL PENULIS -----	159



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





BAB 1

PENGANTAR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

1.1 Definisi Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pemangku kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan. GCG mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan etika dalam pengelolaan perusahaan. Implementasi GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat kepercayaan pemangku

kepentingan, serta mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

Unsur-Unsur Utama GCG

1. Transparansi

Transparansi dalam Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada keterbukaan dan kejelasan dalam pengungkapan informasi yang relevan dan material kepada pemangku kepentingan. Prinsip ini menekankan pentingnya menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, sehingga pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang berdasarkan fakta yang jelas. Beberapa dampak positif dari transparansi yaitu

Meningkatkan Kepercayaan

Transparansi membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Ketika perusahaan terbuka tentang kinerja dan keputusan mereka, pemangku kepentingan cenderung merasa lebih yakin dalam berinvestasi atau berinteraksi dengan perusahaan tersebut.

Mengurangi Risiko

Dengan mengungkapkan informasi secara terbuka, perusahaan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Transparansi membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan



memiliki akses yang sama terhadap informasi penting, mengurangi potensi konflik kepentingan.

Mendukung Pengambilan Keputusan yang Informatif

Pemangku kepentingan yang memiliki akses ke informasi yang komprehensif dapat membuat keputusan yang lebih baik. Ini berlaku tidak hanya untuk investor tetapi juga untuk karyawan yang ingin memahami arah dan tujuan perusahaan.

Ada beberapa praktik transparansi dalam GCG yaitu

Laporan Keuangan yang Jelas

Perusahaan harus menyediakan laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami, termasuk catatan yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan asumsi yang digunakan. Laporan keuangan yang jelas berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, baik entitas maupun pemangku kepentingan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif.

Pengungkapan Kebijakan

Kebijakan perusahaan terkait tata kelola, remunerasi, dan manajemen risiko harus diungkapkan secara terbuka. Hal ini mencakup informasi tentang dewan direksi, komite, dan struktur kepemimpinan. Pengungkapan kebijakan yang jelas dan transparan berperan penting dalam menciptakan transparansi yang lebih besar dalam laporan keuangan. Ini tidak hanya

meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, tetapi juga membangun akuntabilitas dan kepercayaan, yang esensial untuk hubungan jangka panjang yang baik.

Komunikasi yang Proaktif

Perusahaan harus berkomunikasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, situs web, dan laporan tahunan. Ini menciptakan dialog yang lebih terbuka dan responsif. Komunikasi yang proaktif berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dalam interaksi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Dengan menyediakan informasi secara terbuka dan tepat waktu, perusahaan dapat membangun kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan terlibat.

Meskipun transparansi sangat penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkannya:

- **Resistensi Internal:** Beberapa manajemen mungkin enggan untuk mengungkapkan informasi yang dapat dianggap sensitif atau merugikan bagi perusahaan.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** Perusahaan harus memastikan bahwa praktik transparansi mereka memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku.
- **Kualitas Informasi:** Informasi yang disediakan harus akurat dan relevan. Penyajian informasi yang



menyesatkan atau tidak lengkap dapat merusak kepercayaan.

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam Good Corporate Governance yang mendukung akuntabilitas dan kepercayaan. Dengan menerapkan praktik transparansi yang baik, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab hukum tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan. Ini menciptakan iklim kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik. Akuntabilitas adalah komponen kunci dalam memastikan bahwa individu dan organisasi bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Dengan membangun sistem akuntabilitas yang kuat, perusahaan dan organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

3. Keadilan

Keadilan mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham

minoritas, harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan adalah prinsip dasar yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berfungsi dengan baik. Dengan mengedepankan keadilan dalam kebijakan, praktik, dan interaksi sosial, kita dapat membangun lingkungan yang lebih setara dan inklusif bagi semua individu.

4. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup komitmen untuk beroperasi dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka, serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Tanggung jawab sosial adalah komponen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengambil tanggung jawab sosial, individu dan organisasi tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Implementasi GCG yang baik memiliki banyak manfaat, antara lain:

- Meningkatkan Kepercayaan: GCG yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang esensial untuk keberlanjutan perusahaan.



- Mengurangi Risiko: Dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi yang dapat merugikan operasional.
- Kinerja Keuangan yang Lebih Baik: Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak.

Good Corporate Governance merupakan fondasi yang penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis.

1.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) terdiri dari serangkaian prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis, transparan, dan akuntabel. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

1. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan dan material mengenai perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas dan tepat waktu

mengenai kinerja keuangan, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh manajemen dan dewan direksi. Transparansi membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan. Prinsip ini mencakup penetapan tanggung jawab yang jelas serta mekanisme untuk mengevaluasi kinerja. Akuntabilitas penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata publik.

3. Keadilan

Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Semua pemangku kepentingan harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) mencakup komitmen untuk beroperasi dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan dampak



sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. CSR menjadi bagian integral dari GCG, karena mencerminkan nilai-nilai perusahaan.

5. Integritas

Integritas adalah prinsip yang menekankan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus beroperasi dengan kejujuran dan sifat etis yang kuat, menghindari praktik-praktik yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan. Integritas dalam operasi dan manajemen sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan.

6. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Perusahaan harus melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, yang dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih baik. Dialog yang terbuka antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance sangat penting untuk menciptakan struktur yang mendukung pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga

berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan etis.

1.3 Relevansi Good Corporate Governance di Era Digital

Good Corporate Governance (GCG) memainkan peran penting dalam mengelola perusahaan di era digital, di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Relevansi GCG semakin meningkat seiring dengan tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh transformasi digital. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menyoroti relevansi GCG di era digital.

1. Meningkatkan Transparansi Melalui Teknologi

Di era digital, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Platform digital memungkinkan pengungkapan informasi yang lebih cepat dan efisien kepada pemangku kepentingan. Misalnya, laporan keuangan dan informasi terkait dapat diunggah secara real-time di situs web perusahaan, memberikan akses yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas yang Ditingkatkan

Digitalisasi memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja manajemen secara lebih efektif. Dengan sistem informasi manajemen yang canggih, perusahaan dapat melacak keputusan dan tindakan manajemen dengan lebih

baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas. Ini juga memberikan alat bagi dewan direksi untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif.

3. Menghadapi Risiko Cyber

Era digital membawa risiko baru, terutama dalam bentuk serangan siber. GCG yang baik harus mencakup strategi untuk mengelola risiko ini, termasuk pengembangan kebijakan keamanan informasi dan pelatihan bagi karyawan. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan tindakan preventif, perusahaan dapat melindungi data dan informasi yang sensitif.

4. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan secara lebih langsung dan transparan. Media sosial dan platform digital lainnya memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam dialog. Ini membantu perusahaan memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dengan lebih baik.

5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Di era digital, perusahaan dituntut untuk lebih responsif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. GCG yang baik harus mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial, yang dapat diperkuat melalui inisiatif digital seperti kampanye kesadaran sosial dan program keberlanjutan yang dipublikasikan secara online. CSR

adalah komponen penting dalam strategi bisnis modern. Dengan mengambil tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya berkontribusi kepada masyarakat, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Implementasi CSR yang efektif dapat menjadi kunci untuk keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan di masa depan.

6. Inovasi dan Keberlanjutan

Digitalisasi mendukung inovasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan keberlanjutan. GCG yang baik harus mendorong inovasi dengan menciptakan budaya yang mendukung eksperimen dan penggunaan teknologi baru, sehingga perusahaan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Good Corporate Governance di era digital bukan hanya tentang memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan teknologi dan mengadopsi prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan, sambil menghadapi tantangan baru yang muncul di dunia digital. Good Corporate Governance sangat relevan di era digital, terutama dalam konteks inovasi dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan tantangan pasar. Selain itu, dengan mengintegrasikan



praktik keberlanjutan dalam tata kelola mereka, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





● BAB 2

DIGITALISASI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

hasil cetak ini tanpa izin Penerbit

2.1 Konsep Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi atau data dari format fisik ke format digital. Ini memungkinkan data untuk disimpan, diakses, dan diproses menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone.

1. Aspek Penting dari Digitalisasi

Konversi Data

Mengubah dokumen kertas, gambar, suara, dan video menjadi format digital. Contohnya, memindai dokumen kertas menjadi file PDF. Konversi data adalah proses penting dalam pengelolaan dan analisis data. Dengan memahami cara mengonversi data secara efektif, individu dan organisasi dapat meningkatkan interoperabilitas, analisis, dan efisiensi penyimpanan data. Namun, penting untuk memperhatikan tantangan yang mungkin muncul selama proses ini untuk menjaga keakuratan dan integritas data.

Penyimpanan dan Akses

Data digital dapat disimpan dalam cloud atau perangkat penyimpanan, memudahkan akses dan berbagi informasi. Penyimpanan dan akses data adalah elemen kunci dalam pengelolaan informasi modern. Dengan memahami cara menyimpan dan mengakses data secara efisien, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, keamanan, dan efektivitas operasional. Menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan teknologi terkini dapat membantu dalam mencapai tujuan ini.

Otomatisasi

Proses digitalisasi sering diikuti oleh otomatisasi, di mana tugas-tugas manual digantikan oleh sistem digital, meningkatkan efisiensi. Otomatisasi adalah alat yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Dengan memahami manfaat dan



tantangan yang terkait, organisasi dapat memanfaatkan otomatisasi secara efektif untuk mencapai tujuan mereka. Implementasi teknologi otomatisasi yang tepat dapat membawa keuntungan kompetitif dan mempersiapkan bisnis untuk masa depan.

Interaksi

Digitalisasi memungkinkan interaksi yang lebih baik antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi mobile atau situs web. Interaksi digitalisasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan berkolaborasi. Dengan memanfaatkan alat dan platform digital, individu dan organisasi dapat meningkatkan efisiensi, keterlibatan, dan aksesibilitas. Namun, tantangan seperti keamanan dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi interaksi digital.

2. Manfaat Digitalisasi

Efisiensi

Proses yang lebih cepat dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses dan memproses informasi. Digitalisasi memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Dengan mengotomatiskan proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kolaborasi, organisasi dapat beroperasi dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Transformasi digital yang sukses dapat membawa keuntungan kompetitif yang signifikan dan meningkatkan kinerja keseluruhan.

Penghematan Biaya

Mengurangi kebutuhan akan ruang fisik untuk penyimpanan dan biaya pengelolaan dokumen. Digitalisasi memberikan peluang besar untuk penghematan biaya di berbagai bidang operasional. Dengan mengotomatisasi proses, mengurangi penggunaan sumber daya fisik, dan meningkatkan efisiensi, organisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Transformasi digital yang berhasil tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Aksesibilitas

Memudahkan orang untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Digitalisasi secara signifikan meningkatkan aksesibilitas bagi individu dan organisasi. Dengan menyediakan layanan dan informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, digitalisasi memperluas kesempatan untuk keterlibatan dan inklusi sosial. Transformasi ini tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Keamanan

Data digital dapat dilindungi dengan enkripsi dan sistem keamanan lainnya. Digitalisasi menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan keamanan data dan operasi organisasi. Dengan menerapkan teknologi canggih untuk melindungi informasi, memantau ancaman, dan



meningkatkan kesadaran, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman. Pendekatan proaktif terhadap keamanan digital tidak hanya melindungi aset penting, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan.

Contoh Digitalisasi

- Perpustakaan Digital: Mengonversi buku dan artikel ke dalam format digital untuk diakses secara online.
- E-commerce: Mengalihkan penjualan dari toko fisik ke platform online.
- Edukasi: Menggunakan platform pembelajaran online untuk mengajar dan belajar.

Digitalisasi adalah langkah penting dalam transformasi informasi di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan data.

www.penerbitbukumurah.com

2.2 Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi

1. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Transparansi

Akses Informasi:

Teknologi memungkinkan publik untuk mengakses informasi dengan mudah. Misalnya, portal data pemerintah yang menyediakan data anggaran, statistik, dan laporan kegiatan secara terbuka. Teknologi sangat penting dalam meningkatkan transparansi melalui akses informasi. Dengan memanfaatkan platform digital, sistem manajemen data, dan alat komunikasi modern, organisasi

dapat memastikan bahwa informasi tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara organisasi dan publik.

Sistem Pelaporan

Penggunaan aplikasi dan platform digital memungkinkan laporan yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, sistem pelaporan online untuk pengaduan masyarakat yang memudahkan masyarakat memberikan umpan balik. Sistem pelaporan yang didukung oleh teknologi berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan transparansi. Dengan automasi, aksesibilitas, dan visualisasi data yang lebih baik, organisasi dapat memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi semua pemangku kepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara organisasi dan publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Blockchain

Teknologi blockchain menawarkan cara yang aman dan transparan untuk mencatat transaksi. Misalnya, dalam sektor keuangan, blockchain dapat digunakan untuk melacak transaksi dan memastikan tidak ada manipulasi data.

Media Sosial

Media sosial memungkinkan komunikasi langsung antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Ini



memberi kesempatan bagi publik untuk berinteraksi dan mendapatkan informasi secara real-time. Media sosial berperan penting dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan platform untuk akses informasi, interaksi langsung, dan umpan balik yang cepat. Dengan memanfaatkan media sosial, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan. Transformasi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat tetapi juga mendukung partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Analisis Data

Teknologi analitik memungkinkan pengolahan data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren. Dengan informasi ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Analisis data berperan krusial dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses. Melalui visualisasi, laporan yang transparan, dan pengambilan keputusan berbasis data, organisasi dapat membangun kepercayaan dengan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan teknologi analisis data, transparansi dapat ditingkatkan di berbagai sektor, mendukung partisipasi aktif dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

E-Government

Pemerintah menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan publik secara online, memudahkan

masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan tanpa harus bertatap muka. E-government berperan penting dalam meningkatkan transparansi pemerintahan melalui akses informasi, partisipasi warga, dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan responsif, membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan publik tetapi juga memperkuat demokrasi dan partisipasi sosial.

Monitoring dan Evaluasi

Teknologi memungkinkan pemantauan kegiatan dan proyek secara real-time. Misalnya, penggunaan aplikasi untuk melacak kemajuan proyek pembangunan, sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan secara langsung. Teknologi berperan sangat penting dalam meningkatkan transparansi melalui proses monitoring dan evaluasi. Dengan memanfaatkan sistem pengumpulan data real-time, dashboard interaktif, dan pelaporan yang transparan, organisasi dapat memastikan bahwa informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara organisasi dan publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti.



2. Manfaat Transparansi yang Ditingkatkan

- Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan informasi yang lebih terbuka, organisasi dan pemerintah dapat lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- Membangun Kepercayaan: Transparansi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan diinformasikan.
- Partisipasi Publik: Teknologi mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan publik.

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi di berbagai bidang. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi dapat diakses dengan lebih mudah, akuntabilitas dapat ditingkatkan, dan partisipasi publik dapat didorong, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan demokratis.

2.3 Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Sistem ini dirancang untuk membantu organisasi dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol.

1. Komponen Sistem Informasi

- **Hardware:** Perangkat fisik yang digunakan dalam sistem, seperti komputer, server, dan perangkat penyimpanan. Hardware berperan penting dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data. Dengan menggunakan perangkat yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa informasi tersedia, akurat, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara organisasi dan publik, serta mendukung keputusan yang lebih baik dan transparan.
- **Software:** Program atau aplikasi yang mengelola data, seperti sistem manajemen database (DBMS) dan aplikasi analisis data. Software berperan penting dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan alat dan platform untuk pengumpulan, analisis, dan penyajian data. Dengan memanfaatkan sistem manajemen data, aplikasi pelaporan, dan alat komunikasi, organisasi dapat memastikan bahwa informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara organisasi dan publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan transparan.



- **Data:** Informasi yang dikumpulkan dan diolah dalam sistem. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, dan lainnya. Data berperan sangat penting dalam meningkatkan transparansi. Dengan memastikan aksesibilitas, kualitas, dan analisis data yang baik, organisasi dapat menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya kepada publik. Selain itu, visualisasi dan penggunaan data dalam monitoring dan evaluasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan akuntabel. Ini semua berkontribusi pada pembangunan kepercayaan antara organisasi dan masyarakat serta mendukung partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- **Prosedur:** Langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Prosedur dalam komponen sistem informasi melibatkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, distribusi, umpan balik, dan pemeliharaan data. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi berfungsi dengan baik dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu untuk pengambilan keputusan yang transparan dan efektif. Disiplin dalam prosedur ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem informasi.

- **Pengguna:** Orang yang menggunakan sistem informasi untuk mengambil keputusan, seperti manajer, staf, dan pemangku kepentingan lainnya. Pengguna memainkan peran krusial dalam sistem informasi, mulai dari pengguna akhir hingga pengembang dan administrator. Pemahaman tentang kebutuhan dan peran masing-masing pengguna sangat penting untuk merancang sistem yang efektif dan efisien. Dengan melibatkan semua jenis pengguna dalam proses pengembangan dan implementasi, organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dan mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan.

2. Peran Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan

Pengumpulan Data

Sistem informasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, memberikan informasi yang diperlukan untuk analisis. Pengumpulan data dalam sistem informasi adalah proses yang sangat penting yang memerlukan perhatian terhadap sumber, metode, dan kualitas data. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Proses pengumpulan yang baik juga membantu membangun

kepercayaan antara organisasi dan pengguna, meningkatkan transparansi dalam operasional.

Analisis dan Pemrosesan

Dengan alat analisis, sistem informasi dapat memproses data untuk menghasilkan laporan dan visualisasi yang membantu dalam memahami tren dan pola. Analisis dan pemrosesan data dalam sistem informasi sangat penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, alat teknologi yang efisien, dan penyajian hasil yang jelas, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih transparan. Proses ini juga membantu dalam mengidentifikasi tren dan mengevaluasi kinerja, yang semuanya mendukung tujuan strategis organisasi.

Dukungan Keputusan

Sistem informasi menyediakan berbagai model dan simulasi yang membantu manajer dalam mengevaluasi opsi dan membuat keputusan yang lebih baik. Dukungan keputusan dalam sistem informasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berbasis bukti. Dengan memanfaatkan data, analisis, dan visualisasi, serta integrasi dengan proses bisnis, sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya mengarah pada hasil yang lebih baik tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Kecepatan Pengambilan Keputusan

Dengan akses cepat ke informasi yang relevan, keputusan dapat diambil lebih cepat, sehingga meningkatkan responsivitas organisasi. Kecepatan pengambilan keputusan dalam sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem untuk menyediakan data secara real-time, otomatisasi proses, dan penggunaan alat analisis serta visualisasi. Dengan menerapkan teknologi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kecepatan dan efektivitas pengambilan keputusan, memungkinkan mereka untuk merespons perubahan dengan cepat dan mengambil tindakan yang lebih tepat waktu. Hal ini pada akhirnya mendukung keberhasilan operasional dan strategis organisasi.

Monitoring dan Evaluasi

Sistem informasi memungkinkan pemantauan kinerja dan evaluasi hasil keputusan, membantu dalam perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi dalam sistem informasi pengambilan keputusan adalah proses yang krusial untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil efektif dan memberikan hasil yang diinginkan. Dengan mengumpulkan data yang relevan, menganalisis hasil, dan mengumpulkan umpan balik, organisasi dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Proses ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan budaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi.



3. Jenis Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (DSS)

Membantu manajer dalam membuat keputusan berdasarkan data dan model analitis.

Sistem Informasi Manajemen (MIS)

Menyediakan informasi untuk manajemen di semua level organisasi, membantu dalam perencanaan dan pengendalian.

Sistem Eksekutif Informasi (EIS)

Sistem yang dirancang untuk memberikan informasi ringkas kepada eksekutif untuk pengambilan keputusan strategis.

Sistem informasi memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan di organisasi. Dengan menyediakan data yang akurat dan relevan, serta alat analisis yang efektif, sistem informasi membantu manajer dan pemimpin dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi memainkan peran krusial dalam meningkatkan pengambilan keputusan di organisasi. Dengan menyediakan data yang akurat, alat analisis yang efektif, dan mendukung kolaborasi, SI membantu manajer dan pemimpin membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini tidak hanya

meningkatkan kinerja organisasi tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





● BAB 3

POLITICAL ECONOMY OF ACCOUNTING

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

PEMBAHASAN tentang kajian teori *Political Economy of Accounting* (PEA) akan peneliti sajikan dengan sistematika berikut ini, yang dimulai dengan gambaran ekonomi neo-klasik, kritik atas konsep ekonomi neo-klasik, ekonomi politik klasik sebagai pijakan teori PEA. PEA dalam konteks laba rugi dan ditutup dengan *road map* penelitian PEA.

3.1 Ekonomi Neo-klasik

Pemikiran Marx dan Engels yang meramalkan bahwa sistem kapitalis akan runtuh, banyak ditentang oleh para pakar yang mendukung sistem kapitalis karena analisis yang dibuat Marx dan Engels untuk meramal keruntuhan kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neo-klasik mempelajari kembali secara mendalam. Para pakar yang menentang pemikiran Karl Marx tersebut disebut kelompok mazhab ekonomi neo klasik (Suseno, 1999). Empat pakar ekonomi neo klasik yang cukup terkenal yaitu W. Stanley Jevons (1835-1882), Leon Walrs (1837-1910), Carl Menger (1840-1921) dan Alfred Marshal (1842-1924). Keempat pakar tersebut telah melakukan penelitian tentang hal yang sama dan menemukan simpulan bahwa teori nilai lebih Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas. Karya-karya yang menyebutkan bahwa teori nilai lebih Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas adalah W. Stanley Jevons menulis *Theory of Political Economy* pada tahun 1871, Leon Warlas dari sekolah Lausanne (swiss) menulis *Elements of pure economics* pada tahun 1874, Carl Menger dari Austria menulis *Principles of economics in Germany* pada tahun 1871, dan Alfred Marshall dari *Cambridge University* sebetulnya pernah menulis *Principles of economics* pada awal tahun 1870-an, namun buku tersebut baru diterbitkan 20 tahun kemudian. Jevons, Walrs, Menger dan Marshal bersepakat bahwa Marx tidak memberikan sumbangan apapun dalam

perkembangan teori ekonomi dan bisa diabaikan (Deliarnov, 2007: 106-107).

Para pakar neo-klasik dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal (*Marginal Analysis*) atau *Marginal Revolution*. Pada intinya, konsep ini merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen, serta penentuan harga-harga di pasar. Teori ini telah lama digunakan dan dikembangkan Heindrich Gossen (1810-1858) dalam menjelaskan kepuasan (utility) dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurutnya, kepuasan marginal (*Marginal Utility*) dari pengkonsumsian suatu macam barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak (Hukum Gossen I). Dalam Hukum Gossen II, menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas, secara relatif, untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Idenya adalah harga dan biaya ditentukan oleh permintaan konsumen akhir dan utilitas marginal relatifnya adalah mata rantai terakhir yang hilang dari evolusi ekonomi modern (Skousen, 2006: 209)

Pemakaian konsep marjinal oleh banyak pihak yang tergabung dalam berbagai mazhab, antara lain: mazhab Austria, Mazhab Lausanne, dan mazhab *Cambridge*. Adapun mazhab *Cambridge* ini nantinya digunakan oleh Tinker (1980) dalam mengkritisi penggunaan konsep marjinalis (Tinker, 1980: 151-153). Oleh Karena itu peneliti akan mengupas peran dari ketiga mazhab tersebut. Mazhab Austria yang berasal dari Universitas Wina

(Austria) mempunyai pandangan dengan ciri-ciri tersendiri, yaitu penerapan kalkulus dalam mengembangkan konsep marjinal. Tiga tokoh utama mazhab Austria tersebut adalah Karl Menger, Friedrich Von Wieser, dan Eugen Von Bohm Bawerk. Karl Menger (1840-1921) dalam karya utamanya mengembangkan teori utilitas marjinal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Wieser (1851-1920) berjasa dalam mengembangkan teori utilitas marjinal dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas (*opportunity cost*). Bohm Bawerk (1851-1914) kontribusi utamanya dalam mengembangkan teori tentang modal (*theory of capital*) dan teori tentang tingkat suku bunga (Deliarnov, 2007: 107-110).

Mazhab Lausanne (*Lausanne School of Economics*) menyumbangkan pemikiran yang lebih maju bagi neoklasik, yaitu analisis yang lebih komprehensif tentang teori keseimbangan umum, adapun pelopornya adalah Leon Walras (1878). Kemudian, pemikiran Walras dilanjutkan oleh Vilfredo Pareto. Pareto meneruskan matematika yang sudah dikembangkan Walras. Menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisiensi jika dalam suatu re-alokasi tidak ada seorang individupun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Singkatnya suatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien jika keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas dan tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Apa yang disampaikan

oleh Pareto tersebut kemudian sebagai hukum Pareto (*Pareto's Law*) (Deliarnov, 2007; 110-112).

Tokoh neo-klasik yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshal (1842-1924). Marshal dianggap sebagai pelopor aliran atau mazhab *Cambridge* (*Cambridge School of Economics*) di Inggris. Marshal dianggap berjasa dalam memperbarui jasa dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar klasik dan pakar neo-klasik sebelumnya (Deliarnov, 2007; 112). Menurutnya harga adalah kondisi permintaan, biaya-biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga. Yang paling menentukan harga sesuai teori utilitas marjinal adalah utilitas yang diterima dari pemakaian satu unit terakhir dari barang tersebut. Lebih jelas lagi, bagi Marshal harga terbentuk sebagai integrasi dua kekuatan di pasar yaitu penawaran dari pihak produsen dan permintaan konsumen. Integrasi dua kekuatan tersebutlah yang menentukan harga di pasar, bukan produsen saja, atau konsumen saja, tetapi kedua-duanya (Deliarnov, 2007: 114).

Lebih lanjut menurut Marshal, jika banyak pembeli dan penjual dan tidak ada halangan masuk atau keluar pasar (*free entry and exit*), dalam jangka panjang harga yang terbentuk di pasar hanya cukup untuk menutup biaya-biaya saja (di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya buruh atau jasa para manajer perusahaan). Jadi dalam jangka panjang perusahaan tidak memperoleh laba yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan kaum neo-klasik percaya bahwa bentuk pasar persaingan sempurna

merupakan bentuk pasar yang paling efisien yang akan menguntungkan semua pihak. Perusahaan-perusahaan memperoleh laba normal (*normal profit*), yang besarnya laba hanya cukup untuk dapat bertahan di pasar. Para konsumen dapat membeli barang dalam jumlah cukup dengan harga rendah. Sumber-sumber daya dimanfaatkan secara optimum dan dialokasikan secara efisien (Deliarnov, 2007; 115).

3.2 Kritik atas Konsep Ekonomi Neo-klasik

Ekonomi neo-klasik, menurut Wiboyo (1988), telah banyak mendapat kritik dari beberapa ahli. Fakta “kegagalan pasar” dalam seluruh aspeknya kini telah luas diakui. Kecuali bagi para ekonom yang berpandangan sempit yang beranggapan bahwa pasar betapapun tidak sempurnanya masih bermanfaat untuk mengalokasikan kelangkaan sumber daya secara efisien. Menurut premis dasar aliran neo-klasik ini barometer pasar seperti tingkat harga, besar upah, tingkat suku bunga, pendapatan nasional, dan lain sebagainya, masih mencerminkan perubahan-perubahan “permintaan-penawaran”. “Teori keseimbangan umum” yang menjadi dasar terbentuknya mekanisme pasar serta kekuatan tawar-menawar antar orang dalam sebuah sistem ekonomi, masih terus digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, serta merencanakan perekonomian.

Beberapa kritik atas ekonomi neo-klasik secara umum disampaikan Wiboyo (1988: 2-3) antara lain:

pertama, hubungan pertukaran, baik pada tingkat agen, principal, perusahaan, kelompok, antar wilayah ataupun negara. Kegiatan pertukaran ini dilakukan oleh semua pihak untuk memperoleh manfaat. Dalam keadaan tertentu, semua pihak yang terlibat dalam jaringan pertukaran barang maupun jasa tersebut akan memperoleh manfaat sesuai dengan “*preferensi subyektif*” masing-masing orang. Melalui mekanisme harga, memungkinkan hubungan produksi (sebagai kasus khusus dari pertukaran tak langsung) dipadukan ke dalam hubungan pertukaran. Dengan demikian dalam paham ekonomi neo-klasik, nilai ekonomi muncul karena interaksi antar individu yang terpisah dari hubungan produksi dan tidak mengakar pada nilai kerja. Hubungan pertukaran komoditi berlangsung menurut preferensi subyektif setiap individu, yang diungkapkan sebagai suatu urutan konsisten dari sejumlah komoditi yang dianggap tersedia di satu pihak, dan langka di pihak lainnya.

Kedua, hubungan pertukaran selalu berada dalam keseimbangan umum. Jika muncul ketidakstabilan di dalam interaksi permintaan dan penawaran, maka dipostulatkan ketidakstabilan itu akan tetap menuju kepada keseimbangan umum, entah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam kenyataan ekonomi, terbukti bahwa ketidakseimbangan pasar (distorsi harga, inflasi maupun stagnasi) sering berlangsung tanpa henti. Resesi ekonomi 1870-an, depresi besar 1930-an dan *stagflasi* yang berlangsung sekarang ini, membuktikan bahwa teori

“general equilibrium” tidak mampu menjelaskan krisis ekonomi yang berkepanjangan, karena dalam konjungtur atau *“business cycle”* jangka panjang keadaan ketidakseimbangan lebih dominan ketimbang keseimbangan.

Ketiga, preferensi (subyektif) kekuatan yang selalu sama. Jika terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi maupun politik (monopoli, oligopoly), maka hal ini akan diabaikan, atau dianggap tidak berlaku. Sementara itu, skala preferensi biasanya dianggap sebagai “nomor urut”. Meskipun dalam kurva-kurva isokuan teori “ekonomi mikro” dan teori “permainan” (*game theory*) misalnya, diperkenankan permodelan dengan bilangan ordinal, tetapi pertanyaan “preferensi itu didasarkan atas apa?” tidak akan pernah terjawab.

Terakhir, interaksi dan tanggapan para pelaku ekonomi berwatak rasional. Ukurannya adalah terukur, terbilang dan berasa dalam kondisi kepastian yang mutlak. Jika terjadi irasionalitas, misalnya selera konsumen tidak sesuai dengan penawaran, maka model ekonomi neo-klasik ini menganggapnya sebagai “patologis” atau tak sesuai. Justru dalam kondisi perekonomian dewasa ini, akan selalu mengalami kasus dimana *“rational expectation”* tak dapat dilakukan. Contoh kasus menurunnya harga minyak dunia pada dasawarsa 80-an merupakan hal yang bertolak belakang sama sekali dari perkiraan pada awal dasawarsa 1970-an (Wiboyo, 1988: 3)

Pemikiran akuntansi kritis mulai populer pada akhir tahun 1980-an, yakni sejak dipublikasikannya artikel dari



David J. Cooper dan Trevor M. Hopper (1987) yang berjudul *Critical Studies in Accounting*. Sebelumnya, telah ada kajian-kajian kritis, misalnya oleh Hoogvelt dan Tinker, 1978; Tinker, 1980; Cooper, 1980; Tinker *et. al.*, 1982; Cooper dan Sherer, 1984; serta Chua 1986. Dalam perkembangannya semakin banyak variasi akuntansi kritis yang dicoba dikembangkan oleh para ilmuwan pada generasi selanjutnya, misalnya akuntansi syariah (*shari'ate accounting*) yang diintrodusir oleh Triyuwono (1995).

Secara umum pijakan akuntansi kritis tersebut masih konsisten sampai saat ini, di mana perkembangan akuntansi tidak dapat dilepaskan dari lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (Cooper dan Sherer, 1984: 207), sekaligus faktor-faktor ini merupakan variabel untuk menganalisis kinerja keuangan korporasi yang terefleksikan oleh produk akuntansi. Pijakan ini merupakan sesuatu yang krusial, pasalnya sampai saat ini sebagian besar riset akuntansi dalam analisisnya hanya melihat sisi dalam akuntansi (yang sangat sempit) itu sendiri dan belum menyadari bahwa akuntansi tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya ruang yang disediakan oleh setting politik. Lebih lanjut, Hoogvelt dan Tinker (1978), sebagai salah satu pemikir awal akuntansi kritis, menunjukkan bahwa kinerja keuangan korporasi multinasional di negara miskin sangat dipengaruhi oleh setting politik yang ada di negara tersebut.

Berpijak pada riset yang dilakukannya terhadap korporasi tambang multinasional (*Delco*) asal Inggris (*United Kingdom, UK*) yang merupakan salah satu

operasinya di Sierra Leone dan direlasikan dengan kontroversi yang terjadi di *Cambridge University* (*Cambridge Controversies*) tentang kritik Piero Sraffa terhadap teori ekonomi neo-klasik (marginalisme) pada tahun 1962, maka diintrodusirlah *Political Economy of Accounting* (PEA) oleh Tinker (1980). Salah satu inti yang coba diketengahkan oleh Tinker pada publikasi ini adalah teori yang mendasari praktek akuntansi sangat dipengaruhi teori neo-klasik (marginalisme).

Dalam pandangan Tinker (1980:152-153), jawaban yang disediakan oleh teori ekonomi neo-klasik adalah pada tingkat produksi yang tetap (L dan C tetap), harga relatif dan biaya tenaga kerja dan modal tergantung dari adanya keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Selanjutnya, titik V yang merefleksikan output produksi maksimal dari suatu negara dapat terjadi tatkala syarat tentang harga pasar yang menyesuaikan dengan kemiringan T_2 terpenuhi. Selanjutnya, apabila diasumsikan lagi bahwa modal (C) ditingkatkan nilainya (menjadi C'), maka pendapatan relatif rumah tangga akan lebih rendah mengikuti penurunan dan keseimbangan harga dari penawaran dan permintaan. Namun, peningkatan modal ini akan meningkatkan output nasional karena terdapat peningkatan kuantitas yang dihasilkan oleh kombinasi yang baru tersebut.

Uraian-uraian di atas akan menuju kepada kesimpulan bahwa kombinasi yang setara antara tenaga kerja (L) dengan modal (C) dalam menghasilkan pendapatan negara hanya berlaku pada saat proses



menghasilkan output nasional. Oleh karena itu, kesetaraan tersebut tidak berlaku pada saat dilakukan distribusi pendapatan nasional. Berdasarkan fungsi produksi dalam teori ekonomi neo-klasik tersebut, pemilik modal (C) memperoleh porsi distribusi pendapatan atas terjadinya aktivitas ekonomi di suatu negara yang disokong oleh korporasi lebih banyak mengalir kepada pemilik modal daripada kepada tenaga kerja (Tinker, 1980).

Pilar utama yang coba diintrodusir oleh Tinker dalam *Political Economy of Accounting* (PEA) sebagai upaya menggantikan nilai marginalisme (dari teori ekonomi neo-klasik) yang mendasari teori dan juga praktek akuntansi adalah nilai-nilai dari ranah teori ekonomi politik klasik. Namun demikian, teori ekonomi politik sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial sesuai dengan sifat khasnya tidaklah memiliki kebenaran yang mutlak. Kebenaran merupakan sesuatu yang relatif dan oleh karena itu, teori ini terus mengalami perubahan dikarenakan perubahan relasi ekonomi politik.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa ekonomi neo-klasik memiliki kelemahan yang mendasar yaitu tidak mengakui ekspektasi irrasional yang dalam realitasnya terjadi, serta bersifat marginal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah landasan ekonomi lain yang bisa menjawab beberapa kelemahan mendasar tersebut. Ekonomi politik klasik (*Cassical Political Economy*) sebagai hasil otokritik atas teori ekonomi neo-klasik diharapkan mampu menjawab kelemahan teori neo-klasik.

3.3 Ekonomi Politik Klasik: Pijakan Teori PEA

Ekonomi politik pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615 dengan buku *Traité de l'économie politique*, yang diperkenalkan oleh Physiocrats Perancis bernama *Antoine de Montchrétien*. Tokoh utama dari aliran ekonomi ini adalah Adam Smith (1729-1790) dan kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya, seperti Thomas Robert Malthus (1766-1834), David Ricardo (1772-1823), Jean Baptiste Say (1767-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) (Deliarnov, 2007; Ikbar, 2006).

Dalam perkembangannya, makna ekonomi politik adalah pendekatan untuk mempelajari perilaku ekonomi dan politik, mulai dari kombinasi ekonomi dengan bidang lain untuk penggunaan yang berbeda, asumsi dasar yang menantang asumsi ekonomi ortodok. Ekonomi politik paling sering merujuk pada studi interdisipliner ekonomi, hukum, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi (kapitalis, sosialis) saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam arti sempit tafsirannya mengacu pada masalah ekonomi yang berimplikasi pada kebijakan publik, seperti monopoli, perlindungan pasar, kebijakan fiskal pemerintah (Andre, 2010).

Mas'ood (2002) mendefinisikan ekonomi politik sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik, yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi, defisit neraca perdagangan atau pembayaran, penanaman modal asing, efisiensi produksi, dan

sebagainya, berkaitan dengan urusan politik internasional dan politik domestik. Fokus perhatian ekonomi politik adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional.

Pendekatan ekonomi politik klasik memiliki perhatian bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan. Berbeda dengan pendekatan neo-klasik, ekonomi politik mengandalakan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode interpretasi dan instropektif, ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana membuat individu menjadi makmur, yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia (Mas'ood, 2002).

Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bersifat supradisiplin (*supra disciplinary approach*) atau melampaui batas-batas disiplin, ekonomi politik memiliki fokus analisis pada setiap isu ataupun kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung yang melibatkan kepentingan publik. Menggunakan perspektif ekonomi politik dapat ditelusuri apa yang menjadi alasan atau latar belakang pemikiran (*rasionalitas*) dan apa agenda tersembunyi (*hidden agenda*) dari para pembuat kebijakan (*policy maker*) atau rezim yang berkuasa, sejauh hal ini menyangkut masalah perhitungan biaya (*costs*) dan manfaat (*benefits*) dari kebijakan tertentu atau keputusan-

keputusan yang telah diambil terhadap masalah atau sektor pembangunan tertentu (Uphoff dan Ilchman, 1972). Dengan demikian perspektif ekonomi politik memahami sebuah fenomena baik secara tekstual maupun kontekstual yang menjadi landasan pengembangan teori *Political Economy of Accounting* (PEA).

Dalam pemikiran filosofi teoritik, Weber menciptakan tipe ideal tindakan sosial untuk memahami pola dalam sejarah dan masyarakat kontemporer. Ia menciptakan tipe ideal tindakan, hubungan sosial, dan kekuasaan (*power*). Weber mengklasifikasikan tindakan individu ke dalam empat tipe ideal, yaitu *zwecrational*, *wertrational*, tindakan efektif, dan tindakan tradisional. *Zwecrational* berkaitan dengan *means and ends*, yaitu tujuan-tujuan (*ends*) dicapai dengan menggunakan alat atau cara (*means*), perhitungan yang tepat, dan bersifat matematis. *Wertrational* adalah tindakan nilai yang orientasi tindakan tersebut tidak berdasarkan alat atau cara tetapi pada nilai, atau moralitas misalnya. Tindakan efektif individu didominasi oleh sisi emosional, dan tindakan tradisional adalah tindakan pada suatu kebiasaan yang dijunjung tinggi, sebagai sistem nilai yang diwariskan dan dipelihara bersama (Campbell, 1994).

Weber tidak hanya membuat konsep sosiologisnya tindakan individu saja, tetapi juga tentang analisis kelompok, bahkan menjangkau lebih luas dari definisi kelas Karl Marx (Ritzer, 2000). Menurut Marx bahwa kelas adalah determinisme ekonomi, menurut Weber dalam *The Theory of Sosial and Economic Organization* (1947) bahwa

konsep sosiologis kelas yang lebih luas, tidak hanya ekonomi saja. Stratifikasi disamping ditentukan oleh ekonomi, juga *prestige* (status), dan *power* (kekuasaan/politik).

Stratifikasi sosial Weber biasa disebut sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk itulah relasi-relasi sosial manusia diwarnai usaha-usaha untuk meraih posisi-posisi tinggi dalam stratifikasi sosial. Usaha-usaha tersebut biasa dibaca sebagai bentuk dan kombinasi berbagai tipe ideal tindakan. Pada satu kasus tindakan meraih posisi tinggi dalam stratifikasi sosial diwarnai oleh tindakan *zweckrational* saja, dan pada kasus lain diwarnai oleh kombinasi tipe-tipe ideal tindakan. Keadaan inilah yang membuat konflik muncul dalam banyak relasi sosial. Weber membagi tipe ideal hubungan sosial menjadi tiga, yaitu hubungan sosial tradisional-komunal, sosial konflik, dan asosiasi. Sosiologi konflik Max Weber adalah unsur dasar dari setiap tipe ideal hubungan sosial, yaitu *power*. Weber memperlihatkan tiga model kekuasaan. Pertama adalah kekuasaan berbasis pada karisma yang berpusat pada kualitas pribadi. Seperti karisma seorang Soekarno di Indonesia dan Ahmadinejad di Iran. Kedua adalah wewenang tradisional (*traditional authority*) yang diwarisi melalui adat kebiasaan dan nilai-nilai komunal. Ketiga adalah wewenang legal formal (*legal-formal authority*) yang merupakan kekuasaan berbasis pada aturan hukum resmi. (Wallace dan Wolf, 2000: 81-82). Sehubungan dengan prinsip semacam ini dapat dipahami proposisi abstrak

Weber guna memberi landasan teoretik konflik dalam masyarakat. Proposisi tersebut adalah: "Semakin terdapat ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber langka yang ada di dalam sistem, maka akan semakin besar terjadi konflik kepentingan antara segmen dominan dan subordinat. Semakin segmen subordinat menjadi sadar tentang kepentingan kolektifnya yang sesungguhnya (*true collective interest*), semakin cenderung mempertanyakan legitimasi dari keberadaan pola distribusi sumber-sumber langka." (Surata dan Andrianto, 2001: 12). Proposisi ini dapat dijabarkan lebih lanjut untuk menggambarkan gejala konflik antara segmen dominan dan subordinat dalam suatu sistem sosial.

PEA dalam menganalisis laba (rugi) menurut Tinker (1980) dengan cara, pertama memahaminya sebagai relasi antara aktivitas ekonomi dengan struktur organisasi dan kekuasaan (*power*) dari pihak-pihak yang berkepentingan. Di dalam Teori Konflik Sosial digambarkan dengan pihak penguasa atau juga sering disebut dengan pihak yang mendominasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Kedua, menilai bagaimana pendistribusian laba (rugi) dilakukan dan apakah nilai-nilai keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya dalam proses tersebut.

3.4 *Political Economy of Accounting* (PEA) dalam Konteks Analisis Laba (Rugi)

Political Economy of Accounting (PEA) merupakan salah satu dari pendekatan teori kritik (*critical theoretical*

approaches). Rerangka teori kritis telah berkembang diantaranya *symbolic interactionism and ethnomethodology, political economy, Foucauldian, Giddens' structuration theory, Gramsci's concept of hegemony, Derrida's deconstructionism, sosial constructionist, critical structuralist, dan technoscientists* (Lodh dan Gaffikin, 1997, 437; Cooper dan Hopper, 1990, 3-4; Arrington, 2004, 253; Baxter dan Chua, 2003, dalam Irianto, 2006). PEA ini pertama kali diperkenalkan oleh Tinker (1980) dalam artikelnya yang berjudul "*Towards a political economy of accounting: an emphirical illustration of the Cambridge controversies*", serta diperkuat oleh Cooper dan Shere (1984). PEA berpijak pada mahzab ekonomi politik yang radikal dengan tokoh Jean Jacques Rosseau, David Ricardo serta Karl Marx. Mahzab ini beranggapan bahwa kontrol umum atas produksi merupakan hal yang signifikan keberadaannya untuk mencapai tujuan pencerahan (*enlightment*), yaitu kebebasan, kesetaraan pendapatan (*equality*) dan keadilan (Clark, 1988: 55).

Tujuan analisis PEA adalah menghilangkan pengaruh marginalis yang sangat merugikan dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar praktek akuntansi. Dalam pemahaman yang sama bahwa studi akuntansi dengan menggunakan rerangka PEA ditujukan untuk memahami sekaligus melakukan evaluasi atas peran akuntansi dalam konteks yang lebih luas, atau mengkaji bagaimana peran akuntansi dalam konteks tertentu, baik organisasional maupun lingkungan yang lebih luas (Irianto, 2006: 18). PEA merupakan pendekatan untuk menjelaskan dan menafsirkan peran akuntansi dalam

distribusi pendapatan, kekayaan dan kekuasaan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Cooper dan Sherer (1984: 207):

This approach (PEA) seeks to understand and evaluate the functions of accounting within the context of the economic, sosial and political environment in which it operates.

Lebih lanjut Cooper dan Sherer (1984: 207) mendefinisikan secara jelas tentang *Political Economy of Accounting* sebagai berikut:

A Political Economy of Accounting (PEA) is thus a normative, descriptive and critical approach to accounting research. It provides a broader, more holicitic, framework for analyzing and understanding the value of accounting reports within the economy as a whole. A PEA approach attempts to explicate and interpret the role of accounting reports in the distribution of income, wealth and power in society. (Cooper dan Sherer, 1984: 222)

Menurut Tinker (1980), bahwa teori dan praktik akuntansi senantiasa akan dipengaruhi oleh teori tersebut. Namun demikian dalam realitasnya, teori dan praktik akuntansi hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, sedangkan aspek lain tidak dilibatkan didalamnya. Padahal menurut pandangan Tinker (1980), angka laba (rugi) akuntansi sebagai cermin kinerja keuangan perusahaan merupakan refleksi dari situasi dan kondisi saat mulai disusun hingga berakhirnya penyusunan laporan keuangan. Situasi dan kondisi tidak hanya yang



terjadi didalam internal perusahaan namun juga yang terjadi di eksternal perusahaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil penelitian Tinker (1980, 1984, 1988) secara keseluruhan berupaya melakukan evaluasi atas aspek-aspek fundamental yang tercakup dalam pemikiran ekonomi neo-klasik. Tinker menilai bahwa dalam konsep pemikiran ini banyak terdapat kelemahan, khususnya sebagai dasar dalam mengembangkan praktik akuntansi selama ini, dan selanjutnya diberikan suatu alternatif pemikiran dengan menggunakan *classical political economic* sebagai dasar dalam mengembangkan praktik akuntansi.

Tabel 3.1 Pemaknaan Laba

	<i>Neo Classical Economics</i> (<i>Marginalism</i>)	<i>Classical Political Economy</i>
Pemaknaan Laba	Merupakan indikator atas efisiensi ekonomi	Pengembalian modal
Penjelasan teori atas penentuan tingkat laba	Teori produktivitas marginal memfokuskan pada kekuatan produksi	Analisis politik dan sosial yang memfokuskan pada hubungan sosial dari produksi

Sumber: Tinker (1980:148)

Tinker (1980), sebagaimana diringkas dalam tabel 2.1, selanjutnya menjelaskan ada dua macam perbedaan konsep antara ekonomi neo-klasik dan ekonomi politik

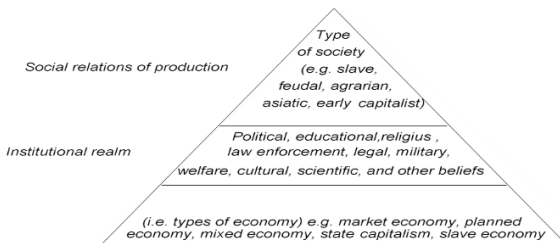
klasik. Perbedaan pertama berkaitan dengan masalah laba, pada teori ekonomi politik klasik laba dimaknai sebagai tingkat pengembalian kepada pemilik modal. Pendekatan ekonomi neo-klasik mengartikan laba sebagai indikator dari efisiensi produksi. Dalam ekonomi neo-klasik (*marginalisme*), tenaga kerja diposisikan sebagai bagian dari pemilik modal, dikarenakan setiap aktifitas yang dilakukan pekerja merupakan tindakan bersama dalam rangka mencapai efisiensi yang telah ditargetkan.

Pemahaman laba menurut neo-klasik mengandung maksud bahwa efisiensi yang nyata adalah tujuan akhir dan bersama yang harus dicapai oleh seluruh bagian dalam perusahaan. Sebaliknya dalam teori ekonomi politik klasik laba merupakan tingkat pengembalian kepada pemilik modal. Selain itu, dalam penentuan tingkat laba, dikarenakan laba merupakan indikator dari efisiensi produksi, maka dalam teori ekonomi klasik laba dipahami sebagai perhitungan selisih antara jumlah input dibandingkan jumlah output dalam proses produksi.

Berdasarkan pemahaman ini, maka untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi, diperlukan cara untuk menekan biaya faktor produksi maupun kuantitas factor produksi dalam rangka pencapaian return dari pemilik modal. Menurut pemahaman dalam teori ekonomi politik klasik penentuan tingkat laba diperoleh dengan cara lebih memfokuskan pada relasi sosial dalam proses produksi di perusahaan. Dalam arti penentuan laba tidak semata-mata memandang selisih input dan output, namun lebih luas hingga pada seberapa jauh hubungan sosial

yang timbul dari proses produksi dalam sebuah perusahaan.

Perbedaan kedua menyangkut masalah modal sebagaimana digambarkan dalam gambar 2.1. Menurut teori ekonomi politik modal memiliki dua dimensi yaitu, sebagai instrument dari produksi dan kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lain dalam organisasi sosial. Dalam teori ekonomi politik dimensi modal pertama merupakan pemaknaan modal sebagai sebuah kekuatan dari ekonomi (*economic force*) dalam melakukan proses produksi. Dimensi kedua dijelaskan pengertian modal sebagai proses hubungan-hubungan sosial dari produksi (*the sosial relations of production*). Hubungan-hubungan sosial dari produksi ini selanjutnya bisa direfleksikan dari keragaman lembaga sosial yang ada antara lain lembaga hukum, negara, pendidikan, agama, politik, sosial dan lembaga administrasi negara. Keberadaan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap manusia dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gambar 3.1 Dua Konsep Modal dan Hubungannya

Sumber: Tinker (1980: 153)

Dalam perkembangannya, PEA telah digunakan Cooper dan Sherer (1984) untuk menilai laba (rugi) perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut dikembangkan lebih banyak untuk memenuhi kepentingan segelintir pemilik modal saja dan cenderung mengabaikan kepentingan dari *stakeholders* lain. Selanjutnya Cooper dan Sherer berupaya untuk merubah pola kajian dengan memasukkan nilai-nilai lain selain ekonomi untuk mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sesungguhnya laporan akuntansi suatu perusahaan (negara) dikembangkan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Cooper dan Sherer (1984:218-219) mempunyai pandangan bahwa PEA memiliki beberapa karakteristik antara lain: Pertama, dalam studi akuntansi perlu mengakui keberadaan kekuasaan dan konflik dalam masyarakat berkenaan penilaian laba (rugi) perusahaan (akuntansi). Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana distribusi pendapatan, kekayaan dan kekuasaan di dalam masyarakat itu bisa terjadi. Kedua, PEA juga mendorong penelitian-penelitian di bidang akuntansi sesuai konteksnya. Dengan kata lain PEA berusaha menganalisis bagaimana sejarah dan proses yang berjalan hingga suatu kegiatan perusahaan bisa muncul. PEA akan memperlakukan nilai sebagai bagian yang sangat esensial atas laporan akuntansi yang diterapkan dalam kepentingan tertentu (misalnya kelompok elit atau kelas tertentu). Ketiga, PEA akan lebih mendorong pemahaman fungsi akuntansi yang lebih dinamis dalam masyarakat

dan menganggap bahwa terjadi saling mempengaruhi antara akuntansi dan lingkungannya.

Penelitian terkait dengan penyusunan sistem akuntansi tidak terlepas dari kepentingan negara-negara besar dilakukan oleh Rosser (1999) dengan menggunakan PEA dalam menelaah reformasi akuntansi. Hasil analisis menyatakan bahwa di Indonesia sistem akuntansi cenderung diasumsikan tidak bisa lepas dari karakter dan kepentingan dunia barat. Oleh karena negara berkembang menduduki posisi sub ordinat dalam sistem ekonomi global, maka realitasnya perusahaan-perusahaan hanya mempunyai sedikit pilihan untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang mampu melayani kepentingan dari perusahaan-perusahaan negara barat dan multi nasional. Pilihan-pilihan untuk kepentingan nasional relatif lebih banyak. Oleh karena itu pilihan atau langkah yang ditempuh dengan melakukan adopsi kebijakan akuntansi barat daripada mengembangkan kebijakan yang ada.

Penelitian kasus privatisasi, dimana pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan informasi akuntansi yang berbeda dilakukan oleh Irianto (2004). Penelitian ini menggunakan alat analisis PEA dalam mengkaji pelaksanaan privatisasi di perusahaan BUMN di Indonesia yaitu PT. A Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus proses privatisasi di Indonesia, informasi akuntansi telah digunakan baik oleh pihak yang mendukung maupun oleh pihak yang menentang kebijakan privatisasi pada salah satu BUMN di Indonesia. Dalam kasus tersebut ternyata masing-masing pihak

menggunakan pendekatan dan “angka-angka akuntansi” yang berbeda-beda dalam rangka memberikan justifikasi atas argumen masing-masing.

Dalam kasus privatisasi ini distribusi kepemilikan perusahaan kepada masyarakat secara adil dan jujur dalam temuan Irianto (2004) belum dapat dilakukan secara sungguh-sungguh, terencana dan seksama. Hal ini terbukti dalam proses privatisasi PT. Semen Gresik Tbk dalam tiga periode yaitu pada tahun 1991, 1995, dan 1998, ternyata telah terjadi oposisi yang kuat dengan munculnya hegemoni MNCs dari berbagai *stakeholders* yaitu Lafarge (Perancis), Cemex (Mexico), Heidelberger Group (German), Holcim/Holderbank (Swiss) dan Blue Circle (Inggris). Selanjutnya hanya terdapat 7 perusahaan yang menguasai industri semen di tanah air, dari jumlah tersebut hanya 3 perusahaan telah mampu menguasai kapasitas terpasang semen di Indonesia, hingga mencapai 90 persen lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri semen di Indonesia sangat tergantung dari kinerja ketiga perusahaan ini.

Penelitian sehubungan dengan kegagalan privatisasi dalam melakukan distribusi laba dan kesejahteraan dilakukan oleh Andrianto (2007). Penelitian menggunakan PEA dalam menganalisis struktur kepemilikan korporasi pada kasus kepemilikan silang kelompok usaha Temasek Holding Ltd, terhadap PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia maupun perusahaan swasta lokal tidak mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas ekonomi.

Dengan kata lain struktur kepemilikan asing telah gagal melakukan distribusi laba dan distribusi kesejahteraan.

Sehubungan dengan kegagalan distribusi oleh perbankan BUMN di Indonesia, Andrianto (2008) dan Andrianto dan Irianto (2008) melakukan penelitian menggunakan *New Political Economy of Accounting* (N-PEA), yaitu menggabungkan konsep PEA dengan teori rasional pilihan (*rational choice theory*) dan teori keadilan (*justice theory*) dalam menguji kinerja perbankan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa distribusi laba perbankan BUMN Indonesia telah gagal pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terkait dengan kegagalan privatisasi untuk meningkatkan kinerja dan distribusi laba dilakukan oleh (Sokarina, 2011). Penelitian ini menggunakan *Modified Political Economy of Accounting* (M-PEA) yang merupakan sebuah kombinasi teori kritis dengan filsafat yang menggabungkan teori PEA Klasik yaitu mengacu pada PEA yang diintrodusir oleh Tinker (1980) dengan hermeneutika dialogis Gadamer yang telah dimodifikasi oleh Rahardjo (2007), yang selanjutnya disebut hermeneutika Gadamerian. Penelitian ini dilakukan pada PT Telkom Tbk dan PT Indosat Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi belum meningkatkan kinerja baik berdasarkan parameter fisik keuangan maupun distribusi laba kepada stakeholders bahkan bukan perluasan kepemilikan yang terjadi namun terkonsentrasinya kepemilikan pada perusahaan asing yang menjadi penguasa separuh jaringan dunia.

Penelitian yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan refleksi dari kekuasaan dilakukan oleh Haryadi (2011). Penelitian ini menggunakan alat analisis PEA yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) BTM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan merupakan refleksi kekuasaan (*power*) manajemen yang menjadikan strategi kenaikan tarif sebagai hal yang rutin, membebani pelanggan dan penetapannya meninggalkan nilai kejujuran dan keterbukaan, (2) Beban utang merupakan refleksi penggunaan kekuasaan yang bersifat pemaksaan, menyembunyikan kepentingan dibalikinya, (3) Beban gaji merupakan dampak pengabaian kepedulian pada warga sekita sumber, serta keengganan untuk bersama mengelola sumber air, (4) Kerugian adalah cermin penggunaan kekuasaan yang tidak professional dan mementingkan diri sendiri.

Perumusan regulasi pasar merupakan proses yang tidak bisa dilepaskan dengan pengaruh politik dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Penelitian tentang regulasi pasar yang terkait dengan proses politik dengan situs penelitian di Amerika Serikat, Inggris dan beberapa Negara lainnya di Eropa dilakukan oleh Moran (2010: 2015). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa aspek politik menjadi ukuran penting dalam menilai regulasi pasar, karena aspek tersebut mempengaruhi struktur kelembagaan, budaya politik dan arah sejarah.

Penelitian lainnya sehubungan dengan perubahan dilingkungan ekonomi politik dimana undang-undang



dana pension disusun dengan perubahan standar akuntansi dana pensiun di empat Negara Anglo-Amerika dilakukan oleh Klumpes (2011: 140). Adapun aspek-aspek yang dinilai meliputi peraturan dana pensiun, regulasi yang ditetapkan oleh lembaga profesional, bahasa dan diskursus akuntansi dana pensiun. Regulasi tentang dana pensiun yang kurang jelas di hilangkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sejak tahun 1970 an, secara umum para pensiunan tampak sebagai figur yang secara sosial aman.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas, esensi dari *Political Economy of Accounting* (PEA) yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis dalam memahami laba (rugi) perusahaan dengan cara : (1) mengakui keberadaan kekuasaan (power) dan konflik dalam masyarakat atas terciptanya angka laba (rugi) atau dengan kata lain mengakui penelusuran laba (rugi) pada konteksnya (Cooper dan Sherer, 1984:218), (2) memahami hakekat laba (rugi) adalah refleksi atau pengejawantahan dari *power* yang dimiliki oleh “pemilik kepentingan utama” perusahaan. (Tinker, 1980, 1984); (3) memaknai angka laba (rugi) sebagai refleksi dari situasi dan kondisi saat mulai disusun hingga berakhirnya penyusunan laporan keuangan (Tinker, 1980). Situasi dan kondisi tidak hanya yang terjadi di dalam internal perusahaan namun juga yang terjadi di eksternal perusahaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, (4) menawarkan pandangan *transformative* dari memaknai laba sebagai tujuan utama (*bottom line*) menjadi

a just and fair distribution (Tinker, 1980:147, Tinker et.al, 1982, Neimark dan Tinker, 1986:374).

3.5 Road Map Kajian PEA

Dalam rangka untuk mengetahui kajian PEA secara menyeluruh, maka penulis menelusuri jejak-jejak kajian PEA mulai dari awal munculnya teori ini sampai dengan perkembangan terkini. Jejak-jejak kajian PEA penulis sajikan dalam bentuk sajian *Road Map* penelitian PEA yang tidak hanya sebatas untuk menganalisis beberapa kasus privatisasi tetapi juga untuk menganalisis sistem pengawasan manajemen dan struktur kepemilikan korporasi. Kajian-kajian PEA, secara umum menggambarkan bahwa dalam pengukuran kinerja suatu entitas, diperlukan kajian-kajian lain selain kajian ekonomi, yaitu kajian dari aspek sosial maupun politik. Kedua aspek kajian ini dalam teori *Political Economy of Accounting* (PEA), untuk menjelaskan sejauh mana laba (rugi) yang diperoleh suatu entitas dipengaruhi oleh kekuasaan (*power*) dan sejauh mana tingkat keadilan distribusi laba (rugi) yang akan diterima oleh *stakeholders* (lampiran 23).



● BAB 4

FINANCIAL FRAUD: PENYEBAB DAN DAMPAK

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

4.1 Definisi Financial Fraud

Financial fraud atau penipuan keuangan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu atau menyesatkan pihak lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Penipuan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan individu, perusahaan, atau lembaga keuangan.

1. Jenis-jenis Financial Fraud

Kecurangan Akuntansi

Manipulasi laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Contohnya termasuk overstatement pendapatan, penggelapan aset, atau penghapusan kewajiban.

Penipuan Investor

Tindakan yang menipu investor dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan tentang investasi. Ini bisa berupa skema Ponzi, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar imbal hasil kepada investor lama.

Kecurangan dalam Pinjaman

Memanipulasi informasi untuk mendapatkan pinjaman atau kredit yang tidak layak. Ini dapat melibatkan penyediaan informasi palsu mengenai pendapatan atau aset. Kecurangan dalam pinjaman merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak luas bagi individu dan lembaga keuangan. Memahami berbagai bentuk kecurangan ini dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi peminjam yang jujur.

Penggelapan

Pengambilan uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Ini sering



terjadi dalam konteks karyawan yang menggelapkan dana perusahaan.

Penipuan Kartu Kredit

Penggunaan informasi kartu kredit orang lain tanpa izin untuk melakukan transaksi atau menarik dana. Penipuan kartu kredit mencakup berbagai metode yang dapat mengeksploitasi kelemahan dalam sistem keamanan dan kesadaran konsumen. Memahami jenis-jenis penipuan ini penting untuk melindungi diri dari kerugian finansial. Masyarakat dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan pengamanan terhadap potensi penipuan kartu kredit.

Fraudulent Transfers

Pemindahan aset dari satu entitas ke entitas lain dengan tujuan menghindari kewajiban atau tanggung jawab, sering kali dilakukan sebelum kebangkrutan. Fraudulent transfers adalah praktik yang berbahaya dan ilegal yang dapat merugikan kreditor dan merusak integritas sistem keuangan. Memahami dan mengenali tanda-tanda fraudulent transfers sangat penting untuk melindungi diri dari potensi kerugian dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pencegahan dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mengurangi risiko praktik curang ini.

2. Faktor Penyebab Financial Fraud

Motivasi Finansial

Kebutuhan untuk memenuhi target finansial atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar sering kali menjadi pendorong utama. Motivasi finansial merupakan faktor kunci yang dapat mendorong individu untuk melakukan financial fraud. Kebutuhan ekonomi, ambisi sosial, insentif perusahaan, kesempatan yang ada, dan rasa aman dapat berkontribusi pada keputusan untuk melakukan penipuan keuangan. Memahami motivasi ini sangat penting dalam merancang strategi pencegahan dan pengawasan yang efektif untuk mengurangi risiko terjadinya fraud di organisasi.

Tekanan Eksternal

Tekanan dari atasan, investor, atau pihak lain untuk mencapai hasil tertentu dapat mendorong individu untuk melakukan penipuan. Tekanan eksternal memainkan peran penting dalam mendorong terjadinya financial fraud. Tekanan dari atasan, persaingan pasar, harapan pemangku kepentingan, krisis ekonomi, serta regulasi yang ketat dapat menciptakan lingkungan yang mendorong individu dan organisasi untuk melakukan tindakan curang. Memahami faktor-faktor ini penting dalam merancang kebijakan dan praktik yang dapat mengurangi risiko penipuan keuangan dan mendorong budaya integritas dalam organisasi.



Kesempatan

Adanya celah dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan individu untuk melakukan penipuan tanpa terdeteksi. Kesempatan memainkan peran penting dalam terjadinya financial fraud. Sistem kontrol internal yang lemah, akses yang tidak memadai, budaya organisasi yang kurang etis, dan kerentanan teknologi semuanya dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya penipuan. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif, meningkatkan kontrol internal, dan membangun budaya organisasi yang menekankan integritas dan transparansi.

Rasionalisasi

Pelaku penipuan sering kali membenarkan tindakan mereka dengan berpikir bahwa mereka tidak merugikan siapa pun atau bahwa tindakan mereka adalah sementara. Rasionalisasi adalah faktor psikologis yang penting dalam terjadinya financial fraud. Justifikasi pribadi, normalisasi kecurangan, minimisasi dampak, pengaruh sosial, dan keyakinan pada hak pribadi semuanya berkontribusi pada proses rasionalisasi yang memungkinkan individu untuk melakukan penipuan tanpa merasa bersalah. Memahami aspek ini sangat penting dalam upaya pencegahan fraud, agar organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan etika, serta mengurangi kesempatan untuk melakukan tindakan curang.

3. Dampak Financial Fraud

Kerugian Finansial

Financial fraud dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi individu, perusahaan, dan investor. Ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan mereka.

Kerusakan Reputasi

Perusahaan yang terlibat dalam penipuan keuangan dapat mengalami kerusakan reputasi yang parah, yang dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Sanksi Hukum

Pelaku penipuan dapat menghadapi konsekuensi hukum, termasuk denda berat, sanksi, dan bahkan penjara.

Dampak Sosial

Penipuan keuangan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan institusi.

4. Pencegahan Financial Fraud

Pengendalian Internal yang Kuat

Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penipuan, termasuk audit reguler dan pelatihan bagi karyawan.

Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang risiko penipuan dan cara mengenal tanda-tanda penipuan.



Pelaporan dan Tindakan:

Mendorong pelaporan penipuan dan memberikan perlindungan bagi whistleblower untuk melindungi mereka yang melaporkan tindakan curang.

Financial fraud adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak luas pada individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami berbagai jenis penipuan keuangan, faktor penyebab, dan dampaknya, organisasi dan individu dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi masalah ini.

4.2 Tipe-Tipe Financial Fraud

Financial fraud mencakup berbagai tindakan penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah. Berikut adalah beberapa tipe utama financial fraud:

1. Kecurangan Akuntansi (Accounting Fraud)

Kecurangan akuntansi adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak luas pada perusahaan dan pemangku kepentingan. Memahami jenis, motivasi, dan tanda-tanda kecurangan akuntansi, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, sangat penting untuk melindungi integritas laporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik.

Deskripsi

Tindakan mengubah laporan keuangan untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada yang sebenarnya.

Contoh:

- Overstating revenue (menyajikan pendapatan yang lebih tinggi).
- Understating liabilities (mengurangi jumlah kewajiban).
- Manipulasi angka penyusutan atau amortisasi.

2. Penipuan Investor (Investment Fraud)

Penipuan investor adalah masalah serius yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu. Memahami berbagai jenis penipuan, taktik yang digunakan, dan tanda-tanda peringatan sangat penting untuk melindungi diri dari praktik curang ini. Edukasi dan kewaspadaan adalah kunci untuk mencegah penipuan dan menjaga integritas pasar investasi.

Deskripsi

Praktik yang menipu investor dengan informasi palsu atau menyesatkan tentang peluang investasi.

Contoh

- Skema Ponzi: Menggunakan dana dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor lama.
- Penawaran investasi yang tidak terdaftar atau tidak terdaftar dengan janji keuntungan tinggi dan risiko rendah.



3. Penggelapan (Embezzlement)

Penggelapan adalah tindakan yang merugikan dan dapat memiliki dampak serius pada perusahaan dan individu. Memahami jenis, taktik, dan tanda-tanda penggelapan, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis. Pencegahan dan deteksi dini merupakan kunci untuk mengurangi risiko penggelapan di organisasi.

Deskripsi

Pengambilan uang atau aset yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi.

Contoh

- Seorang karyawan yang mengambil uang dari kas perusahaan untuk penggunaan pribadi.
- Manipulasi rekening untuk mengalihkan dana ke akun pribadi.

4. Penipuan Kartu Kredit (Credit Card Fraud)

Penipuan kartu kredit adalah masalah serius yang dapat menimbulkan kerugian finansial besar bagi individu dan institusi. Memahami jenis penipuan, tanda-tanda, serta langkah-langkah pencegahan yang efektif sangat penting untuk melindungi diri dari praktik curang ini. Kewaspadaan dan edukasi adalah kunci untuk mengurangi risiko penipuan kartu kredit.

Deskripsi

Penggunaan informasi kartu kredit orang lain tanpa izin untuk melakukan transaksi.

Contoh

- Pencurian data kartu kredit melalui phishing atau malware.
- Pembelian barang menggunakan informasi kartu kredit yang dicuri.

5. Kecurangan dalam Pinjaman (Loan Fraud)

Kecurangan dalam pinjaman adalah masalah yang serius yang dapat menyebabkan kerugian besar baik bagi lembaga keuangan maupun peminjam yang jujur. Memahami jenis, tanda-tanda, dan taktik kecurangan, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, sangat penting untuk menjaga integritas proses pinjaman dan melindungi semua pihak yang terlibat.

Deskripsi

Memanipulasi informasi untuk mendapatkan pinjaman atau kredit yang tidak layak.

Contoh

- Memberikan informasi palsu tentang pendapatan atau aset untuk mendapatkan persetujuan pinjaman.
- Menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman.



6. Fraudulent Transfers

Transfer yang curang menimbulkan risiko serius bagi kreditor dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Memahami jenis, indikator, dan implikasi hukum dari transfer yang curang sangat penting untuk melindungi hak dan kepentingan dalam transaksi keuangan. Menerapkan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dapat secara signifikan mengurangi risiko aktivitas penipuan.

Deskripsi

Pemindahan aset dari satu entitas ke entitas lain untuk menghindari kewajiban atau tanggung jawab.

Contoh

- Mengalihkan aset kepada anggota keluarga atau pihak ketiga sebelum mengajukan kebangkrutan untuk melindungi aset dari kreditor.

7. Penipuan dalam Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Penipuan dalam laporan keuangan adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak luas pada perusahaan dan pemangku kepentingan. Memahami berbagai jenis penipuan, motivasi, dan tanda-tanda penipuan dalam laporan keuangan, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan membangun kepercayaan publik.

Deskripsi

Penyajian laporan keuangan yang menyesatkan untuk menarik investor atau menghindari sanksi.

Contoh

- Menggunakan praktik akuntansi agresif untuk menyajikan proyeksi pendapatan yang terlalu optimis.
- Menghilangkan biaya atau pengeluaran untuk menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi.

8. Penipuan Pajak (Tax Fraud)

Tindakan menipu untuk menghindari pembayaran pajak.

Contoh

- Menyembunyikan pendapatan atau mengklaim pengurangan pajak yang tidak sah.
- Menggunakan struktur perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak.

9. Penipuan dalam Penjualan (Sales Fraud)

Penipuan dalam penjualan adalah masalah serius yang dapat merugikan konsumen dan perusahaan. Memahami jenis dan tanda-tanda penipuan, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif, sangat penting untuk melindungi semua pihak yang terlibat. Membangun kepercayaan melalui praktik penjualan yang etis dan transparan adalah kunci untuk mencegah penipuan dalam penjualan.



Deskripsi

Penipuan yang terjadi dalam proses penjualan produk atau jasa.

Contoh:

- Menjual produk yang tidak ada atau tidak sesuai dengan deskripsi.
- Menggunakan taktik penjualan yang menyesatkan untuk mendapatkan komisi.

10. Skema Penipuan Online (Online Fraud)

Skema penipuan online merupakan ancaman serius yang dapat merugikan individu dan perusahaan. Memahami berbagai jenis penipuan, taktik yang digunakan, dan tanda-tanda peringatan sangat penting untuk melindungi diri dari praktik curang ini. Edukasi dan kewaspadaan adalah kunci untuk mencegah penipuan online dan menjaga keamanan informasi pribadi.

Deskripsi

Penipuan yang dilakukan melalui internet.

Contoh

- Phishing: Mengirim email palsu untuk mendapatkan informasi pribadi.
- Penipuan e-commerce: Menjual barang yang tidak ada di situs web palsu.

Financial fraud dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan setiap tipe memiliki metode dan konsekuensi yang berbeda. Penting bagi individu dan organisasi untuk mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil

langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri mereka dari risiko ini. Dengan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis financial fraud, masyarakat dapat lebih waspada dan berkontribusi pada lingkungan keuangan yang lebih aman.

4.3 Kasus Nyata Financial Fraud dan Pembelajaran

Berikut adalah informasi lengkap tentang beberapa kasus nyata financial fraud dan pelajaran yang dapat diambil dari masing-masing kasus:

1. Kasus Enron

Deskripsi

Enron Corporation, perusahaan energi Amerika, terlibat dalam salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah. Enron melakukan kecurangan akuntansi dengan menggunakan praktik akuntansi yang agresif, seperti mark-to-market accounting, untuk menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan yang lebih besar daripada yang sebenarnya.

Dampak

- Enron bangkrut pada tahun 2001, mengakibatkan kehilangan pekerjaan bagi ribuan karyawan dan kerugian miliaran dolar bagi investor.
- Akibatnya, perusahaan akuntansi Arthur Andersen, yang terlibat dalam audit Enron, kehilangan reputasinya dan dibubarkan.

Pelajaran

- Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.
- Perlunya regulasi yang lebih ketat dalam industri akuntansi, yang mengarah pada pembentukan Sarbanes-Oxley Act (SOX) pada tahun 2002 untuk meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Kasus Bernard Madoff

Deskripsi

Bernard Madoff menjalankan skema Ponzi terbesar dalam sejarah, dengan estimasi kerugian mencapai \$65 miliar. Madoff menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis kepada investor, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor lama.

Dampak

- Ribuan investor, termasuk individu dan lembaga, kehilangan seluruh atau sebagian besar investasi mereka.
- Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara.

Pelajaran

- Pentingnya melakukan due diligence sebelum berinvestasi.
- Kewaspadaan terhadap tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil tinggi dengan risiko rendah.
- Peran regulator dalam mengawasi aktivitas investasi dan melindungi investor.

3. Kasus Volkswagen (Dieselgate)

Deskripsi

Volkswagen terlibat dalam skandal emisi diesel di mana perusahaan menginstal perangkat lunak di mobil diesel yang mengelabui pengujian emisi. Ini memungkinkan kendaraan untuk memenuhi standar emisi saat diuji, tetapi melepaskan emisi yang jauh lebih tinggi saat digunakan.

Dampak

- Volkswagen menghadapi denda miliaran dolar dan kehilangan kepercayaan konsumen.
- CEO Martin Winterkorn mengundurkan diri, dan banyak eksekutif lainnya dipecat atau dituntut.

Pelajaran

- Integritas dan etika perusahaan sangat penting untuk keberlanjutan bisnis.
- Penipuan tidak hanya berdampak pada keuangan tetapi juga pada reputasi dan hubungan dengan konsumen.
- Perlunya pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

4. Kasus 1MDB

Deskripsi

1Malaysia Development Berhad (1MDB) adalah lembaga investasi milik negara yang terlibat dalam skandal korupsi besar. Sebagian besar dana yang diinvestasikan, yang diperkirakan mencapai \$4.5 miliar,



diduga dicuri oleh pejabat tinggi dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dampak

- Skandal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah Malaysia dan menimbulkan penyelidikan internasional.
- Beberapa mantan pejabat, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak, dituntut.

Pelajaran

- Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik.
- Peran masyarakat dan media dalam mengawasi dan mengungkap praktik korupsi.
- Perlunya kerjasama internasional dalam mengatasi pencucian uang dan korupsi.

Kasus-kasus financial fraud di atas menunjukkan bahwa penipuan keuangan dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan, tidak hanya pada individu dan perusahaan tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Pelajaran yang diambil dari setiap kasus menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam praktik bisnis. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengawasan, kita dapat mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





● BAB 5

FORMULASI DIGITALISASI DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

5.1 Model Formulasi Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi dari format fisik ke format digital, serta menerapkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan strategis suatu organisasi. Model formulasi digitalisasi membantu organisasi dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif digital secara efektif. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam model formulasi digitalisasi:

- Analisis Konteks
 - Identifikasi Kebutuhan: Memahami kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui digitalisasi.
 - Analisis Lingkungan: Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi posisi organisasi dalam konteks digital.
 - Tendensi Pasar: Memahami tren teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi strategi digital.
- Visi dan Strategi Digital
 - Pengembangan Visi: Merumuskan visi digital yang jelas, yang mencerminkan tujuan jangka panjang organisasi.
 - Strategi Digital: Menyusun strategi digital yang mencakup pemilihan teknologi, platform, dan metode implementasi yang sesuai dengan visi.
- Rencana Implementasi
 - Roadmap Digitalisasi: Mengembangkan rencana langkah demi langkah untuk implementasi digital, termasuk timeline dan milestone.
 - Sumber Daya: Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran, teknologi, dan tim yang akan terlibat.
 - Pemetaan Proses: Mengidentifikasi proses bisnis yang perlu diubah atau dioptimalkan untuk mendukung digitalisasi.

- Teknologi dan Infrastruktur
 - Pemilihan Teknologi: Memilih teknologi yang sesuai, seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things (IoT), untuk mendukung inisiatif digital.
 - Pengembangan Infrastruktur: Membangun infrastruktur TI yang mendukung integrasi sistem dan keamanan data.
- Manajemen Perubahan
 - Keterlibatan Karyawan: Melibatkan karyawan dalam proses digitalisasi untuk memastikan buy-in dan mengurangi resistensi.
 - Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan digital dan pemahaman tentang teknologi baru.
 - Budaya Organisasi: Membangun budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi terhadap perubahan digital.
- Pengukuran dan Evaluasi
 - Indikator Kinerja: Menetapkan KPI (Key Performance Indicators) untuk mengukur keberhasilan inisiatif digital.
 - Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas strategi digital dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

- Inovasi Berkelanjutan
 - Adaptasi Teknologi: Terus memantau perkembangan teknologi terbaru dan mengadaptasi strategi sesuai kebutuhan.
 - Feedback dan Iterasi: Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan stakeholder untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

Model formulasi digitalisasi adalah kerangka kerja penting yang membantu organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inisiatif digital. Dengan mengikuti langkah-langkah dalam model ini, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi digital, meningkatkan efisiensi operasional, dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah.

5.2 Strategi Implementasi Digitalisasi

Implementasi digitalisasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang serta pendekatan yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah dan strategi yang dapat diambil untuk mengimplementasikan digitalisasi secara efektif dalam organisasi:

- Penilaian Awal
 - Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan spesifik organisasi dan tujuan yang ingin dicapai melalui digitalisasi.
 - Analisis SWOT: Lakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats untuk

mengevaluasi posisi organisasi dan potensi dalam digitalisasi.

- Kaji Infrastruktur yang Ada: Tinjau sistem dan teknologi yang sudah ada untuk menentukan apa yang perlu diperbarui atau ditingkatkan.
- Pengembangan Visi dan Tujuan
 - Visi Digital: Rumuskan visi yang jelas tentang bagaimana digitalisasi akan mengubah organisasi dan memberikan nilai tambah.
 - Tujuan SMART: Tetapkan tujuan yang Spesifik, Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan), dan Time-bound (berjangka waktu).
- Pemilihan Teknologi dan Platform
 - Identifikasi Teknologi yang Tepat: Pilih teknologi yang sesuai untuk kebutuhan organisasi, seperti cloud computing, big data, Internet of Things (IoT), atau artificial intelligence (AI).
 - Integrasi Sistem: Pastikan teknologi yang dipilih dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada untuk meminimalkan gangguan operasional.
- Pengembangan Rencana Implementasi
 - Roadmap Digitalisasi: Buat rencana langkah demi langkah yang mencakup timeline, milestone, dan tanggung jawab tim.
 - Sumber Daya: Alokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk anggaran, perangkat keras, perangkat lunak, dan personel.

- Pemetaan Proses Bisnis: Identifikasi proses yang perlu diubah atau ditingkatkan agar lebih efisien dengan digitalisasi.
- Manajemen Perubahan
 - Keterlibatan Stakeholder: Libatkan karyawan dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan untuk mendapatkan dukungan dan mengurangi resistensi.
 - Pelatihan dan Pengembangan: Sediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menggunakan teknologi baru.
 - Komunikasi yang Efektif: Pastikan ada saluran komunikasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, dan proses digitalisasi.
- Uji Coba dan Pilot Project
 - Implementasi Prototipe: Lakukan uji coba dengan proyek kecil atau pilot project sebelum implementasi skala penuh untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan yang mungkin muncul.
 - Feedback: Kumpulkan umpan balik dari pengguna selama fase uji coba untuk melakukan perbaikan sebelum peluncuran penuh.
- Peluncuran dan Implementasi Penuh
 - Eksekusi Rencana: Setelah uji coba berhasil, lakukan peluncuran penuh dari inisiatif digital.
 - Dukungan Teknis: Pastikan ada dukungan teknis yang memadai untuk membantu karyawan dalam transisi ke sistem baru.

- Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
 - Indikator Kinerja (KPI): Tetapkan KPI untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi digitalisasi. Ini dapat mencakup efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, dan kepuasan pelanggan.
 - Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas strategi digital dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- Inovasi Berkelanjutan
 - Adaptasi Teknologi: Terus memantau perkembangan teknologi terbaru dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan.
 - Umpan Balik dan Iterasi: Kumpulkan umpan balik dari pengguna dan stakeholder untuk perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam proses.

Strategi implementasi digitalisasi memerlukan pendekatan terencana dan sistematis untuk berhasil. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari digitalisasi, meningkatkan efisiensi, dan tetap kompetitif di era digital. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi dan keterlibatan karyawan.

5.3 Studi Kasus: Perusahaan yang Berhasil

Berikut adalah informasi lengkap tentang beberapa studi kasus perusahaan yang berhasil dalam implementasi digitalisasi:

Studi Kasus Perusahaan yang Berhasil dalam Digitalisasi

1. Netflix

Deskripsi

Netflix adalah layanan streaming film dan acara TV yang awalnya dimulai sebagai penyewaan DVD. Perusahaan ini berhasil melakukan transformasi digital yang signifikan dengan beralih ke model streaming.

Strategi Digitalisasi:

- **Peralihan Model Bisnis:** Netflix beralih dari penyewaan DVD ke streaming digital, memungkinkan pengguna untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja.
- **Penggunaan Data:** Netflix menggunakan analitik data untuk memahami preferensi pelanggan dan menghasilkan rekomendasi konten yang dipersonalisasi.
- **Pembuatan Konten Asli:** Netflix berinvestasi dalam produksi konten asli, seperti "Stranger Things" dan "The Crown," untuk menarik lebih banyak pelanggan dan membedakan diri dari pesaing.

Hasil:

- Netflix menjadi pemimpin dalam industri streaming dengan jutaan pelanggan di seluruh dunia.

- Meningkatkan pendapatan secara signifikan dan mengubah cara orang mengonsumsi media.

2. Amazon

Deskripsi

Amazon dimulai sebagai toko buku online dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia.

Strategi Digitalisasi

- E-commerce dan Marketplace: Amazon menciptakan platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk membeli berbagai produk dengan mudah.
- Teknologi Cloud: Melalui Amazon Web Services (AWS), perusahaan menawarkan layanan cloud kepada bisnis lain, menciptakan sumber pendapatan baru.
- Penggunaan AI dan Otomatisasi: Amazon menggunakan AI untuk mempersonalisasi pengalaman belanja dan otomatisasi dalam pengiriman menggunakan drone dan robot.

Hasil

- Amazon menjadi pemimpin pasar e-commerce dengan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa.
- Memperluas ke berbagai sektor, termasuk streaming video, perangkat keras, dan layanan cloud.

3. General Electric (GE)

Deskripsi

General Electric adalah perusahaan multinasional yang berfokus pada teknologi dan infrastruktur. GE berhasil mengimplementasikan digitalisasi melalui inisiatif Industrial Internet.

Strategi Digitalisasi

- Prediktif Maintenance: GE menggunakan IoT untuk memantau mesin dan peralatan secara real-time, memungkinkan pemeliharaan prediktif yang mengurangi waktu henti.
- Software dan Analitik: Pengembangan platform Predix untuk analisis data industri, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya.
- Inovasi Produk: Menerapkan teknologi digital dalam produk mereka, seperti turbin dan mesin pesawat, untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Hasil

- GE meningkatkan efisiensi dalam operasi dan mengurangi biaya operasional.
- Menjadi pemimpin dalam solusi industri berbasis digital.

4. Starbucks

Deskripsi

Starbucks, jaringan kedai kopi global, berhasil mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.



Strategi Digitalisasi

- Aplikasi Mobile: Starbucks meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk memesan dan membayar secara online, serta mengumpulkan poin loyalitas.
- Penggunaan Data: Mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi dan menawarkan promosi yang dipersonalisasi.
- Wi-Fi dan Media Sosial: Menyediakan Wi-Fi gratis di toko dan aktif di media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan.

Hasil

- Meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas.
- Peningkatan penjualan melalui aplikasi mobile dan program loyalitas.

Studi kasus di atas menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar berhasil dalam implementasi digitalisasi dengan strategi yang tepat. Dari penggunaan data dan analitik, pengembangan teknologi baru, hingga inovasi produk, setiap perusahaan telah menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membawa keuntungan kompetitif yang signifikan. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya memahami kebutuhan pelanggan, beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan menciptakan budaya inovasi dalam organisasi.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





BAB 6

MENCEGAH FINANCIAL FRAUD MELALUI DIGITALISASI

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

6.1 Teknologi untuk Deteksi Dini Fraud

Deteksi dini fraud (penipuan) sangat penting bagi organisasi untuk melindungi aset dan reputasi mereka. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk membantu mendeteksi dan mencegah fraud secara lebih efektif. Berikut adalah beberapa teknologi utama yang digunakan untuk deteksi dini fraud:

1. Analitik Data dan Big Data

Analitik data adalah proses yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Proses ini melibatkan berbagai alat, teknologi, dan teknik untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.. Analitik data mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Ini membantu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan layanan mereka, serta memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman dan masalah pelanggan. Dengan analitik data, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, membangun produk yang relevan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Analitik data digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran, keuangan, kesehatan, dan pendidikan. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka.

Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang tidak dapat dikelola atau dianalisis dengan metode tradisional. Data ini mencakup berbagai jenis, termasuk data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, dan log server. Big Data sering kali dijelaskan melalui tiga karakteristik utama yang dikenal sebagai "3V":



- **Volume:** Mengacu pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detik.
- **Velocity:** Kecepatan di mana data dihasilkan dan harus diproses.
- **Variety:** Beragam jenis data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk teks, gambar, video, dan data sensor.

Big Data adalah kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dengan pemanfaatan yang tepat, Big Data dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan di berbagai sektor.

2. Machine Learning dan Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI) adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai kemampuan seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar, dan pengambilan keputusan.

Jenis-jenis AI

- **AI Tipe Sempit (Narrow AI):** AI yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu, seperti asisten virtual (contoh: Siri, Alexa).
- **AI Tipe Umum (General AI):** AI yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai domain, mirip

dengan kemampuan manusia (masih dalam tahap penelitian).

Machine Learning (ML) adalah cabang dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. ML memanfaatkan algoritma untuk menganalisis data, mengenali pola, dan membuat prediksi.

Jenis-jenis Machine Learning

- **Supervised Learning:** Model dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli. Contoh: klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam.
- **Unsupervised Learning:** Model dilatih menggunakan data tanpa label. Contoh: pengelompokan pelanggan berdasarkan pola pembelian.
- **Reinforcement Learning:** Model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan mendapatkan umpan balik. Contoh: pelatihan agen dalam permainan.

Machine Learning adalah salah satu subbidang dari Kecerdasan Buatan. Sementara AI mencakup semua aspek yang berkaitan dengan menciptakan sistem yang cerdas, Machine Learning berfokus pada teknik khusus yang memungkinkan sistem tersebut belajar dari data. Dengan kata lain, semua aplikasi Machine Learning adalah AI, tetapi tidak semua AI adalah Machine Learning.

3. Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin



dihadapi oleh suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut dan memaksimalkan peluang yang ada.. Berbagai standar dan kerangka kerja dapat digunakan untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko, seperti:

- ISO 31000: Standar internasional untuk manajemen risiko yang memberikan panduan tentang prinsip dan proses manajemen risiko.
- COSO ERM: Kerangka kerja Enterprise Risk Management yang membantu organisasi dalam mengelola risiko secara terintegrasi.

Sistem Manajemen Risiko adalah elemen penting dalam strategi organisasi yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat melindungi aset, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan strategis mereka.

4. Teknologi Blockchain

Blockchain adalah teknologi yang berfungsi sebagai buku besar digital terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Setiap transaksi dicatat dalam "blok" yang kemudian dihubungkan ke blok sebelumnya, membentuk "rantai" (chain). Teknologi ini terkenal karena digunakan pada cryptocurrency seperti Bitcoin, tetapi aplikasinya jauh lebih luas. Teknologi blockchain menawarkan potensi besar untuk merevolusi berbagai industri dengan meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. Meskipun masih menghadapi tantangan, adopsi yang

terus berkembang menunjukkan bahwa blockchain akan menjadi bagian integral dari masa depan teknologi informasi.

5. Sistem Pendeteksi Anomali (Anomaly Detection Systems)

Sistem Pendeteksi Anomali adalah teknologi dan algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kejadian yang menyimpang dari norma dalam suatu dataset. Anomali ini dapat menunjukkan masalah, seperti kegagalan sistem, penipuan, atau serangan siber, yang memerlukan perhatian segera.

Jenis-jenis Anomali

- Anomali Tunggal (Point Anomalies): Kasus di mana satu data titik jauh dari norma.
- Anomali Kumpulan (Contextual Anomalies): Kasus di mana data mungkin normal dalam konteks lain tetapi aneh dalam konteks tertentu.
- Anomali Keterhubungan (Collective Anomalies): Sekelompok data yang bersama-sama menunjukkan perilaku mencurigakan meskipun individu tidak tampak anomali.

Sistem Pendeteksi Anomali memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan integritas data di berbagai sektor. Dengan kemajuan dalam teknologi, terutama dalam machine learning dan analisis data, kemampuan untuk mendeteksi anomali semakin canggih, memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap potensi masalah.



6. Otomatisasi Proses Robotik (RPA)

Otomatisasi Proses Robotik (Robotic Process Automation, RPA) adalah teknologi yang menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang yang biasanya dilakukan oleh manusia. RPA memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu dengan membebaskan karyawan dari tugas-tugas administratif yang membosankan. Otomatisasi Proses Robotik (RPA) merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, RPA memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya dan waktu, serta memberikan karyawan kesempatan untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah. Implementasi RPA yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, manajemen perubahan yang efektif, dan perhatian terhadap keamanan serta kepatuhan.

7. Pemantauan Real-Time

Pemantauan real-time adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data secara langsung dan segera setelah data tersebut dihasilkan. Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan instan, membuat keputusan yang lebih cepat, dan merespons kejadian dengan lebih efisien. Pemantauan real-time adalah komponen penting dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas organisasi di era digital. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, perusahaan

dapat memperoleh wawasan yang berharga dan mengambil tindakan cepat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Implementasi yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, infrastruktur yang kuat, dan perhatian terhadap keamanan data.

6.2 Penggunaan Big Data dan AI

Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses secara efektif dengan alat tradisional. Kecerdasan Buatan (AI) adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Kombinasi antara Big Data dan AI telah membuka banyak peluang di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa aspek penting dari penggunaannya:

1. Analisis Prediktif

Menggunakan data historis dan algoritma AI untuk memprediksi tren dan perilaku masa depan.

Contoh Penggunaan

- Pemasaran: Memprediksi perilaku konsumen untuk menargetkan kampanye iklan dengan lebih efektif.
- Kesehatan: Memprediksi potensi penyakit berdasarkan riwayat medis dan data genetik.

2. Personalisasi Pengalaman Pengguna

AI menganalisis data pengguna untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi.

Contoh Penggunaan

- E-commerce: Rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dan pencarian pengguna.
- Media Streaming: Menyediakan rekomendasi film atau musik berdasarkan preferensi pengguna.

3. Deteksi Penipuan

Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola yang mencurigakan dalam data transaksi.

Contoh Penggunaan

- Perbankan: Mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dalam waktu nyata untuk mencegah penipuan kartu kredit.
- Asuransi: Mendeteksi klaim yang mencurigakan berdasarkan analisis data historis.

4. Automasi Proses Bisnis

AI dapat mengotomatiskan proses bisnis yang berulang dan memakan waktu.

Contoh Penggunaan

- RPA (Robotic Process Automation): Menggunakan robot perangkat lunak untuk menangani tugas administratif seperti pengolahan data dan laporan.

- Chatbots: Mengotomatiskan layanan pelanggan dengan menyediakan jawaban atas pertanyaan umum secara otomatis.

5. Optimasi Rantai Pasokan

Menggunakan analitik Big Data untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan.

Contoh Penggunaan

- Peramalan Permintaan: Menganalisis data penjualan untuk memprediksi permintaan produk dan mengoptimalkan persediaan.
- Manajemen Risiko: Mengidentifikasi potensi gangguan dalam rantai pasokan dengan menganalisis data cuaca, politik, dan ekonomi.

6. Kesehatan dan Medis

Menggunakan Big Data dan AI untuk meningkatkan perawatan kesehatan dan hasil pasien.

Contoh Penggunaan

- Diagnosis: AI membantu dalam menganalisis citra medis untuk mendeteksi penyakit lebih awal.
- Perawatan yang Dipersonalisasi: Menganalisis data genetik dan riwayat medis untuk menentukan pengobatan yang paling efektif untuk pasien.

7. Keamanan Siber

Menganalisis data untuk mendeteksi ancaman dan serangan siber secara real-time.



Contoh Penggunaan

- Deteksi Anomali: Mengidentifikasi perilaku jaringan yang mencurigakan untuk mencegah serangan.
- Respons Otomatis: Menggunakan AI untuk merespons ancaman dengan cepat dan mengurangi dampaknya.

8. Analisis Sentimen

Menggunakan AI untuk menganalisis data dari media sosial dan ulasan untuk memahami persepsi publik.

Contoh Penggunaan

- Pemasaran: Menganalisis sentimen terhadap produk atau merek untuk menginformasikan strategi pemasaran.
- Manajemen Reputasi: Memantau dan merespons umpan balik pelanggan secara efektif.

Penggunaan Big Data dan AI telah merevolusi banyak industri dengan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan kemampuan untuk menganalisis dan memproses data dalam jumlah besar, organisasi dapat mengidentifikasi pola, memprediksi tren, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Kombinasi ini tidak hanya memberikan keuntungan kompetitif tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan perkembangan.

6.3 Pembinaan dan Edukasi untuk Karyawan

Pembinaan dan edukasi karyawan merupakan aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan, sehingga dapat mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari pembinaan dan edukasi karyawan:

1. Tujuan Pembinaan dan Edukasi

- **Pengembangan Keterampilan:** Meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis karyawan agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan industri.
- **Peningkatan Kinerja:** Membantu karyawan mencapai tujuan individu dan organisasi, serta meningkatkan produktivitas.
- **Retensi Karyawan:** Meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, sehingga mengurangi tingkat turnover.
- **Persiapan untuk Posisi Lebih Tinggi:** Menyiapkan karyawan untuk posisi manajerial atau tanggung jawab yang lebih besar di masa depan.

2. Metode Pembinaan dan Edukasi

Pelatihan Formal

Deskripsi: Program pelatihan yang terstruktur, biasanya dilakukan di dalam kelas atau dalam format online.

Contoh:

- Pelatihan teknis (misalnya, perangkat lunak baru).
- Pelatihan kepemimpinan dan manajemen.

Mentoring dan Coaching

Hubungan satu-satu antara karyawan dan mentor atau pelatih untuk pengembangan profesional.

Contoh:

- Mentor memberikan bimbingan tentang karir dan pengembangan keterampilan.
- Coaching untuk meningkatkan kinerja spesifik dalam pekerjaan.

E-Learning dan Pelatihan Online

Deskripsi: Penggunaan platform digital untuk memberikan pelatihan dan kursus secara fleksibel.

Contoh:

- Kursus online untuk meningkatkan keterampilan tertentu.
- Webinar dan sesi pelatihan virtual.

On-the-Job Training

Pelatihan langsung di tempat kerja di mana karyawan belajar sambil bekerja.

Contoh:

- Karyawan baru belajar prosedur melalui bimbingan langsung dari rekan kerja.
- Rotasi pekerjaan untuk memahami berbagai fungsi dalam organisasi.

3. Kegiatan Pembinaan yang Efektif

- Workshop dan Seminar: Kegiatan interaktif yang memungkinkan karyawan belajar dari pakar dan berdiskusi dengan rekan-rekan.
- Sesi Umpan Balik: Memberikan umpan balik secara teratur untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.
- Program Pengembangan Karir: Menyusun rencana pengembangan karir untuk karyawan yang mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

4. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Mengukur efektivitas program pembinaan dan edukasi.

Metode:

- Survei kepuasan karyawan setelah pelatihan.
- Penilaian keterampilan sebelum dan sesudah program pelatihan.
- Analisis kinerja karyawan berdasarkan KPI (Key Performance Indicators).

5. Budaya Pembelajaran Berkelanjutan

Mendorong budaya di mana pembelajaran dan pengembangan dianggap sebagai bagian integral dari pekerjaan.

Strategi:

- Mendorong karyawan untuk mengambil kursus tambahan dan sertifikasi.



- Menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran, seperti buku, e-learning, dan seminar.

6. Tantangan dalam Pembinaan dan Edukasi

- Keterbatasan Anggaran: Pembinaan yang efektif memerlukan investasi, dan terkadang organisasi menghadapi kendala anggaran.
- Ketidakpastian Karyawan: Beberapa karyawan mungkin tidak melihat nilai dalam program pelatihan atau merasa tidak siap untuk perubahan.
- Perubahan Teknologi: Kebutuhan untuk terus memperbarui materi pelatihan agar sesuai dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Pembinaan dan edukasi untuk karyawan adalah investasi penting bagi organisasi. Dengan menyediakan program pelatihan yang efektif dan mendukung pengembangan karir, organisasi dapat meningkatkan keterampilan, kepuasan, dan retensi karyawan. Selain itu, budaya pembelajaran berkelanjutan akan memastikan bahwa karyawan tetap relevan dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

6.4 Formulasi Digitalisasi Good Corporate Governance berbasis Political Economy of Accounting untuk Mencegah Financial Fraud

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik berbasis ekonomi politik akuntansi untuk mencapai

keunggulan lingkungan, dilakukan analisis data kualitatif dalam bentuk kajian pustaka dengan menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Word cloud merupakan visualisasi yang menampilkan kata-kata dari suatu teks, dengan ukuran font yang lebih besar untuk kata-kata yang lebih sering muncul dalam teks. Jika diurutkan dari kata terbesar ke terkecil, maka kata-kata tersebut adalah sebagai berikut: "lingkungan, tata kelola, politik, ekonomi, akuntansi dan politik". Analisis data diawali dengan analisis frekuensi kemunculan kata atau word cloud seperti yang divisualisasikan pada Tabel 6.1 berikut ini

Tabel 6.1 Frekuensi Kemunculan Kata

Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
fraud	5	709	1,08
governance	10	630	0,96
government	10	479	0,73
digital	7	435	0,66
financial	9	398	0,60
corporate	9	356	0,54
accounting	10	293	0,45
management	10	281	0,43
business	8	246	0,37



Gambar 6.1: Word Cloud of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence using Nvivo 12 Plus

Source: Authors' own research

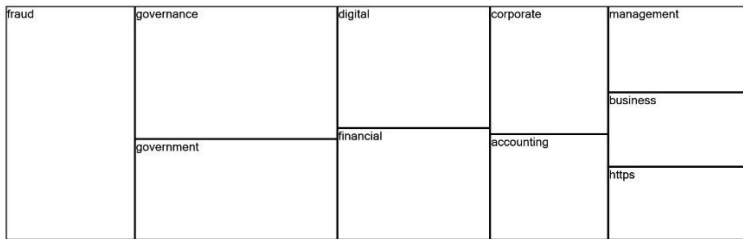
[illegible]

Source: Authors' own research

Ekonomi Politik Akuntansi - 105

akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam organisasi. Alat dan teknik digital memainkan peran penting dalam mentransformasi operasi keuangan, yang mengarah pada peluang strategis bagi perusahaan (Liu et al., 2024). Transformasi ini tidak hanya memengaruhi operasi internal tetapi juga pemangku kepentingan, yang menekankan tujuan jangka panjang dan penciptaan nilai yang berkelanjutan (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016). Lebih jauh, dampak digitalisasi pada praktik tata kelola perusahaan signifikan, memungkinkan aliran informasi yang lebih transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan melalui teknologi canggih seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan (Benavides et al., 2023). Selain itu, hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan akuntansi hijau telah ditemukan memengaruhi kinerja lingkungan secara positif, yang menyoroti pentingnya struktur tata kelola dalam mendorong keunggulan lingkungan di perusahaan manufaktur (Li & Zhao, 2024). Integrasi perangkat digital ke dalam prosedur tata kelola perusahaan menawarkan manfaat seperti efisiensi, penghematan biaya, dan kemudahan, yang menekankan perlunya menyeimbangkan pendekatan digital dan nondigital untuk tata kelola yang efektif (Lazor et al., 2024; Ma et al., 2023; Yang & Jin, 2024). Secara keseluruhan, konvergensi digitalisasi, tata kelola yang baik, dan keunggulan lingkungan menggarisbawahi keterkaitan teknologi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis modern (Wang et al., 2024).



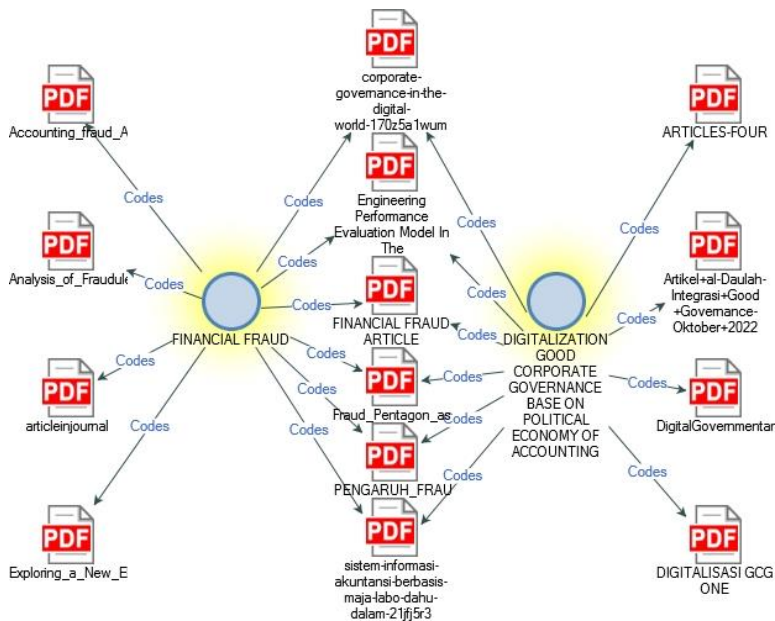


Gambar 6.3: Hierarchy Chart of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence using Nvivo 12 Plus
Source: Authors' own research

Peta proyek mengacu pada hasil pengkodean yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menyajikan hubungan data. Berdasarkan peta proyek, diperoleh informasi bahwa formulasi digitalisasi tata kelola perusahaan berbasis ekonomi politik akuntansi yang diterapkan melalui kebijakan kepemimpinan akan paling dominan mendorong pencapaian keunggulan lingkungan. Transformasi digital tata kelola perusahaan, yang didorong oleh teknologi seperti blockchain dan AI, memiliki implikasi signifikan bagi model bisnis, struktur organisasi, dan kerangka regulasi (Li & Zhao, 2024). Transformasi digital secara signifikan meningkatkan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) perusahaan, terutama aspek lingkungan dan sosial, dengan efek yang lebih nyata pada perusahaan dengan kendala pembiayaan rendah, perusahaan swasta, dan perusahaan non-teknis (Yang & Jin, 2024). Ekonomi digital memainkan peran penting dalam mengekang perilaku greenwashing melalui transparansi informasi dan

pengawasan eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, tanggung jawab sosial, dan profitabilitas (Lazor et al., 2024; Ma et al., 2023; Wang et al., 2024). Selain itu, perkembangan keuangan digital secara signifikan meningkatkan investasi hijau perusahaan, berkontribusi pada pergeseran ke arah model pembangunan hijau dan berkualitas tinggi yang lebih mengandalkan kemajuan teknologi dan peningkatan efisiensi (Rachinger et al., 2019). Oleh karena itu, perumusan digitalisasi tata kelola perusahaan, yang berbasis pada akuntansi ekonomi politik dan kebijakan kepemimpinan, memang dapat mendorong keunggulan lingkungan dan meningkatkan kinerja keuangan, meskipun memerlukan proses pendidikan yang panjang bagi semua anggota organisasi untuk mewujudkan manfaat tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mewujudkannya diperlukan waktu yang cukup karena dalam implementasinya merupakan proses pendidikan bagi semua anggota organisasi.





Gambar 6.4: Comparison Diagrams of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting and Environmental Excellency using Nvivo 12 Plus
Source: Authors' own research

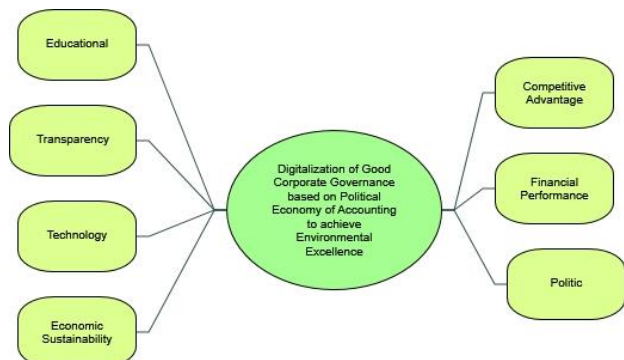
Digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik melibatkan integrasi perangkat dan teknik digital untuk meningkatkan operasi keuangan dan kebijakan kepatuhan, yang menekankan pentingnya digitalisasi secara strategis (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016). Transformasi ini khususnya penting dalam konteks kinerja lingkungan, di mana faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan akuntansi hijau memengaruhi praktik lingkungan dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan (Hoang & Wiegratz, 2023). Lebih jauh, peran

akuntansi dalam tata kelola perusahaan di bank-bank komersial milik negara di negara-negara berkembang menyoroti dinamika kelembagaan dan sosial-politik yang memengaruhi mekanisme tata kelola, yang menunjukkan bagaimana kepatuhan sering kali didorong oleh kebutuhan akan legitimasi daripada perbaikan tata kelola yang sesungguhnya. Memahami kompleksitas digitalisasi dalam tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap keunggulan lingkungan sangat penting untuk menavigasi lanskap operasi bisnis dan praktik keberlanjutan yang terus berkembang (Ma et al., 2023). Digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dibahas dalam berbagai makalah penelitian, melibatkan pentingnya digitalisasi yang strategis dalam operasi keuangan (Jacobs, 2017), peran moderasi akuntansi manajemen lingkungan (EMA) yang didukung secara digital dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan, dan dinamika kelembagaan dan sosial-politik akuntansi dalam tata kelola perusahaan di negara-negara berkembang. Studi-studi ini menyoroti kompleksitas dan interaksi antara perangkat digital, keberlanjutan lingkungan, dan praktik tata kelola. Selain itu, sifat politik-ideologis dari reformasi tata kelola perusahaan dan normativitasnya dibahas, dengan menekankan asumsi dan dampak yang dipertanyakan dari reformasi tersebut (Hoang & Wiegatz, 2023; Liu et al., 2024; Plekhanov et al., 2023; Ramadhani et al., 2023). Lebih jauh lagi, evolusi dan divergensi sistem tata kelola perusahaan nasional, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar saham, menunjukkan perubahan



lanskap model tata kelola secara global (Lazor et al., 2024; Ma et al., 2023).

Digitalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan untuk keunggulan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital secara signifikan meningkatkan tata kelola hijau perusahaan untuk setiap peningkatan unit dalam transformasi digital. Ekonomi digital memberdayakan Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial, dengan mengurangi kendala pembiayaan dan mempromosikan pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, digitalisasi meningkatkan kinerja tata kelola lingkungan dengan meningkatkan regulasi lingkungan pemerintah, partisipasi lingkungan publik, dan inovasi teknologi hijau perusahaan, yang berkontribusi pada sistem tata kelola lingkungan multi-tata kelola (Wang et al., 2024). Namun, tantangan seperti ancaman dunia maya, pelanggaran data, dan kepatuhan peraturan harus ditangani untuk memaksimalkan manfaat implementasi digital dalam tata kelola perusahaan (Rachinger et al., 2019). Di sektor keuangan, pentingnya strategis digitalisasi disorot, yang menekankan perlunya tata kelola yang baik untuk mendukung proses transformasi secara efektif.



Gambar 6.5: Mind Map of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence using Nvivo 12 Plus

Source: Authors' own research

Digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mencapai keunggulan lingkungan, merupakan proses multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengintegrasikan ekonomi digital dengan praktik Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan (ESG) perusahaan dapat meningkatkan kinerja ESG secara signifikan, khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial (Ramadhani et al., 2023). Transformasi ini memerlukan penyelarasan strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, karena fungsi keuangan sangat dipengaruhi oleh digitalisasi, yang membutuhkan kebijakan kepatuhan berdasarkan standar tata kelola perusahaan. Akuntansi dan pelaporan perusahaan memainkan peran penting dalam transformasi digital ini, menghubungkan organisasi dengan para pemangku kepentingan melalui restrukturisasi data yang

efisien dan komunikasi penciptaan nilai dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016; Hoang & Wiegatz, 2023; Plekhanov et al., 2023). Namun, efektivitas akuntansi dalam tata kelola dapat terhambat oleh kompleksitas sosial-politik, di mana kepatuhan sering kali didorong oleh kebutuhan akan legitimasi daripada peningkatan praktik tata kelola. Dengan memanfaatkan alat dan kerangka kerja digital seperti estimasi HDMMap daring, perusahaan dapat lebih mengoptimalkan upaya lingkungan dan efisiensi operasionalnya, yang menunjukkan potensi solusi digital untuk mendorong keunggulan lingkungan dalam lanskap tata kelola perusahaan (Benavides dkk., 2023).

Untuk mencapai keunggulan lingkungan melalui tata kelola elektronik berdasarkan ekonomi politik akuntansi, penting untuk mempertimbangkan interaksi antara struktur tata kelola, kinerja keuangan, dan kebijakan lingkungan (Dziatkovskii A. et al., 2021). Menekankan pentingnya efektivitas, suara dan akuntabilitas pemerintah, dan kualitas regulasi dalam mengekang degradasi lingkungan, menyoroti pentingnya lembaga yang kuat dan langkah-langkah antikorupsi. Selain itu, Nedergaard (Jacobs, 2017) menekankan perlunya sistem tata kelola yang sah dan efisien dalam inisiatif lingkungan, memastikan penerimaan yang luas dan biaya transaksi minimal. Lebih lanjut, Sakhil (Wang et al., 2024) menggarisbawahi dampak struktur tata kelola pada pengungkapan akuntansi lingkungan, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan

lingkungan dapat memoderasi hasil keuangan menuju penilaian perusahaan. Dengan mengintegrasikan wawasan ini, strategi tata kelola elektronik dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi politik untuk meningkatkan keberlanjutan dan kinerja lingkungan.

Tata kelola elektronik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan lingkungan dalam akuntansi dengan memengaruhi berbagai aspek tata kelola lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan e-government yang memanfaatkan teknologi dapat berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan, seperti peningkatan produksi limbah elektronik (Jacobs, 2017; Oliveira, 2018; Ramadhani et al., 2023). Sebaliknya, pengembangan keuangan digital telah terbukti berdampak positif pada tata kelola lingkungan perkotaan dengan mengurangi emisi polutan, khususnya di kota-kota dengan tingkat pengembangan keuangan hijau yang lebih tinggi (Liu et al., 2024; Plekhanov et al., 2023; Ramadhani et al., 2023). Selain itu, pengenalan platform otomatis digital dalam entitas ekonomi dapat berkontribusi pada penghijauan kegiatan dan pembentukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui solusi manajemen lingkungan. Lebih jauh, sistem akuntansi manajemen lingkungan disorot sebagai hal yang penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan menyediakan informasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan hubungan pemangku kepentingan (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016). Secara keseluruhan, e-governance memengaruhi kebijakan lingkungan dalam



akuntansi melalui berbagai efeknya pada keberlanjutan, manajemen keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Alat-alat e-pemerintahan memainkan peran penting dalam memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan lingkungan dengan meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi proses pemerintahan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam administrasi publik dipandang sebagai strategi inovatif untuk pengambilan keputusan yang efektif dan manajemen yang optimal (Benavides et al., 2023; Li & Zhao, 2024; Yang & Jin, 2024). Alat-alat ini, seperti pemetaan partisipatif dan platform e-partisipasi, memfasilitasi keterlibatan publik dalam pemerintahan lingkungan, yang memungkinkan warga untuk berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan mengatasi masalah rasionalitas terbatas dalam sistem pemerintahan perkotaan (Lazor et al., 2024; Wang et al., 2024). Selain itu, adopsi platform e-pemerintahan dipengaruhi oleh ekspektasi publik, kegunaan yang dirasakan, dan harapan upaya, yang menyoroti pentingnya persepsi pengguna dalam mendorong perilaku adopsi. Secara keseluruhan, mekanisme e-pemerintahan dapat mengarah pada struktur pemerintahan yang lebih efektif, peningkatan efektivitas kebijakan, dan pada akhirnya berkontribusi pada proses pembangunan berkelanjutan. Kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan akuntabilitas dalam tata kelola Perangkat e-governance menawarkan banyak keuntungan dalam kebijakan lingkungan,

termasuk transparansi, efisiensi, aksesibilitas, pengurangan korupsi, penghematan biaya, inovasi, dan pelestarian lingkungan (Rachinger et al., 2019). Perangkat ini memungkinkan publik untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, dan memantau isu lingkungan secara efektif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan pemberian layanan publik, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Selain itu, e-governance memfasilitasi pengembangan ekonomi elektronik, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses tata kelola. Lebih jauh lagi, penggunaan perangkat digital dalam tata kelola lingkungan dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kepercayaan publik, dan penerapan praktik ramah lingkungan.

Prosedur tata kelola perusahaan beralih ke platform digital. Menyeimbangkan pendekatan digital dan nondigital sangat penting bagi tata kelola. Ekonomi digital akan secara signifikan meningkatkan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola perusahaan, terutama lingkungan dan sosial. Ekonomi digital terintegrasi dengan tata kelola perusahaan melalui pembiayaan dan pembangunan ekonomi hijau. Ekonomi digital secara signifikan meningkatkan kinerja ESG perusahaan, terutama lingkungan dan sosial. Ekonomi digital terintegrasi dengan tata kelola perusahaan melalui pembiayaan dan pembangunan hijau.





BAB 7

MENCAPAI ENVIRONMENTAL EXCELLENCY

www.penerbitbukumurah.com

Dilarang keras, mencetak naskah

7.1 Konsep Environmental Excellency

Environmental Excellency adalah pendekatan yang mengintegrasikan praktik keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam strategi dan operasi organisasi. Konsep ini bertujuan untuk mencapai keunggulan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, inovasi berkelanjutan, dan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

1. Definisi dan Tujuan

Environmental Excellency adalah pencapaian standar tinggi dalam praktik lingkungan yang melampaui kepatuhan regulasi untuk mencapai hasil yang positif bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Tujuan:

- Menciptakan nilai jangka panjang bagi organisasi dan pemangku kepentingan.
- Mengurangi jejak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
- Mendorong inovasi untuk solusi berkelanjutan.

2. Prinsip-Prinsip Utama

- Keberlanjutan. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasi organisasi, dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir.
- Inovasi. Mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan proses untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.
- Keterlibatan Stakeholder. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemasok, dalam upaya keberlanjutan.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Memastikan transparansi dalam praktik lingkungan dan mempertanggungjawabkan dampak yang dihasilkan.



3. Strategi Implementasi

- Audit Lingkungan. Melakukan audit untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari operasi dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
- Sertifikasi dan Standar. Menerapkan standar internasional, seperti ISO 14001, untuk sistem manajemen lingkungan yang efektif.
- Pengurangan Limbah dan Emisi. Mengimplementasikan praktik pengurangan limbah, seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
- Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien. Mengoptimalkan penggunaan energi dan air dalam proses bisnis untuk mengurangi konsumsi sumber daya.

4. Manfaat Environmental Excellency

- Keunggulan Kompetitif: Organisasi yang menerapkan praktik Environmental Excellency dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik pelanggan yang peduli lingkungan.
- Penghematan Biaya: Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat mengurangi biaya operasional.
- Reputasi yang Baik: Meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang semakin ketat.

5. Tantangan dalam Mencapai Environmental Excellency

- **Biaya Awal:** Investasi awal untuk teknologi dan praktik yang lebih ramah lingkungan mungkin tinggi.
- **Perubahan Budaya Organisasi:** Mengubah pola pikir dan budaya perusahaan untuk memprioritaskan keberlanjutan bisa menjadi tantangan.
- **Keterbatasan Pengetahuan:** Kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam pengelolaan lingkungan dapat menghambat implementasi.

6. Studi Kasus dan Contoh

- **Perusahaan Manufaktur:** Banyak perusahaan manufaktur mengambil langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi.
- **Perusahaan Teknologi:** Beberapa perusahaan teknologi berinvestasi dalam energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon mereka.

Environmental Excellency adalah pendekatan strategis yang membantu organisasi mencapai keunggulan melalui praktik keberlanjutan yang efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam operasi, organisasi tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Penerapan konsep ini memerlukan komitmen yang kuat, inovasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh anggota organisasi.



7.2 Good Corporate Governance dalam Konteks Lingkungan

Good Corporate Governance (GCG) mengacu pada praktik dan proses yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dalam konteks lingkungan, GCG mencakup integrasi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam struktur dan operasi perusahaan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka.

1. Definisi dan Tujuan GCG dalam Konteks Lingkungan

Definisi: GCG dalam konteks lingkungan adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tujuan:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan terkait lingkungan.
- Mengurangi risiko lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
- Mendorong inovasi dan praktik berkelanjutan yang menguntungkan perusahaan dan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip GCG yang Relevan dengan Lingkungan

- **Transparansi.** Perusahaan harus secara terbuka melaporkan dampak lingkungan dari operasi mereka, termasuk penggunaan sumber daya, emisi, limbah, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak tersebut.
- **Akuntabilitas.** Manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola risiko lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan lingkungan diterapkan secara efektif.
- **Tanggung Jawab Sosial.** Mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke dalam strategi bisnis dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- **Keadilan.** Memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan lingkungan, dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

3. Praktik GCG yang Baik dalam Pengelolaan Lingkungan

- **Penerapan Kebijakan Lingkungan.** Menyusun dan menerapkan kebijakan lingkungan yang jelas dan terukur, termasuk sasaran untuk pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah.
- **Audit Lingkungan.** Melakukan audit lingkungan secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap



kebijakan lingkungan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

- Pelaporan dan Transparansi. Mengeluarkan laporan keberlanjutan yang mencakup informasi tentang kinerja lingkungan, termasuk pencapaian, tantangan, dan rencana masa depan.
- Pelibatan Stakeholder. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas, dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan.

4. Manfaat GCG dalam Konteks Lingkungan

- Pengelolaan Risiko: Mengurangi risiko hukum dan reputasi yang terkait dengan pelanggaran lingkungan.
- Peningkatan Citra Perusahaan: Meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan.
- Akses ke Modal: Perusahaan yang menerapkan GCG yang baik cenderung lebih mudah mendapatkan investasi dari pihak yang peduli terhadap keberlanjutan.
- Inovasi dan Efisiensi: Mendorong inovasi dalam produk dan proses yang lebih ramah lingkungan.

5. Tantangan dalam Penerapan GCG yang Berkelanjutan

- Kompleksitas Regulasi: Mematuhi berbagai peraturan lingkungan yang terus berkembang dapat menjadi tantangan.

- Biaya Implementasi: Investasi awal untuk menerapkan praktik GCG yang baik seringkali tinggi.
- Keterbatasan Pengetahuan: Kurangnya pemahaman tentang isu-isu lingkungan di kalangan manajemen dapat menghambat implementasi.

6. Contoh Implementasi GCG dalam Konteks Lingkungan

- Perusahaan Energi Terbarukan: Banyak perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan menerapkan GCG dengan transparansi mengenai dampak lingkungan dari proyek mereka.
- Industri Manufaktur: Beberapa perusahaan manufaktur telah mengadopsi standar ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan.

Good Corporate Governance dalam konteks lingkungan adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan menerapkan GCG yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja lingkungan, mengurangi risiko, dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Penerapan praktik ini tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.



7.3 Studi Kasus: Perusahaan yang Berkelanjutan

Perusahaan berkelanjutan adalah organisasi yang menerapkan praktik yang ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip keberlanjutan:

1. Unilever

Unilever adalah salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di dunia, yang memproduksi berbagai produk dari makanan hingga perawatan pribadi.

Praktik Keberlanjutan:

- **Sustainable Living Plan:** Unilever meluncurkan rencana ini untuk mengurangi jejak lingkungan produk mereka, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan sumber penghidupan.
- **Pengurangan Limbah:** Perusahaan berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik dengan mengembangkan kemasan yang dapat didaur ulang dan menggunakan bahan daur ulang.
- **Energi Terbarukan:** Unilever telah beralih ke penggunaan energi terbarukan di banyak fasilitas produksinya.

Unilever melaporkan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dari rata-rata pasar, menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat menjadi pendorong bisnis yang kuat.

2. Patagonia

Patagonia adalah perusahaan pakaian outdoor yang terkenal dengan komitmennya terhadap lingkungan.

Praktik Keberlanjutan:

- **Bahan Daur Ulang:** Patagonia menggunakan bahan daur ulang dalam produk mereka, termasuk poliester dan kapas organik.
- **Inisiatif "Worn Wear":** Program ini mendorong pelanggan untuk memperbaiki dan menggunakan kembali pakaian alih-alih membeli yang baru, mengurangi limbah.
- **Dukungan untuk Aktivisme Lingkungan:** Patagonia menyumbangkan 1% dari penjualan untuk organisasi lingkungan dan terlibat dalam kampanye untuk melindungi habitat.

Keberlanjutan menjadi bagian integral dari merek Patagonia, menarik pelanggan yang peduli lingkungan dan meningkatkan loyalitas merek.

3. Tesla

Tesla adalah perusahaan otomotif yang berfokus pada inovasi kendaraan listrik dan energi terbarukan.

Praktik Keberlanjutan:

- **Kendaraan Listrik:** Tesla memproduksi kendaraan listrik yang mengurangi emisi karbon dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.
- **Energi Terbarukan:** Perusahaan juga memproduksi sistem penyimpanan energi dan panel surya untuk mendukung transisi ke energi bersih.



- Inovasi Berkelanjutan: Tesla berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi baterai dan teknologi kendaraan.

Tesla menjadi pemimpin pasar dalam kendaraan listrik, dengan penjualan yang terus meningkat dan nilai pasar yang tinggi.

4. IKEA

IKEA adalah perusahaan ritel furnitur global yang terkenal dengan desain produk dan harga yang terjangkau.

Praktik Keberlanjutan:

- Bahan Berkelanjutan: IKEA berkomitmen untuk menggunakan bahan yang dapat diperbarui dan daur ulang dalam produknya.
- Daur Ulang dan Pengurangan Limbah: Perusahaan menerapkan praktik daur ulang dalam proses produksi dan mengurangi limbah di toko-toko.
- Energi Terbarukan: IKEA berinvestasi dalam energi terbarukan dan berusaha untuk menjadi netral karbon pada tahun 2030.

IKEA telah menjadi salah satu merek paling berkelanjutan dalam industri ritel, meningkatkan citra merek dan menarik pelanggan yang peduli lingkungan.

5. Danone

Danone adalah perusahaan makanan dan minuman global yang berfokus pada produk berbasis kesehatan.

Praktik Keberlanjutan:

- Inisiatif "One Planet. One Health": Danone berkomitmen untuk menciptakan produk yang sehat untuk konsumen dan lingkungan.
- Pengurangan Emisi: Perusahaan berusaha untuk mengurangi emisi karbon dari rantai pasokannya dan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang.
- Dukungan untuk Petani: Danone bekerja sama dengan petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Danone telah berhasil meningkatkan penjualan dan reputasi mereknya dengan fokus pada keberlanjutan.

Studi kasus di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan mereka, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, perusahaan-perusahaan ini berhasil menarik pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan reputasi yang positif di pasar. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga peluang bisnis yang dapat memberikan keuntungan kompetitif.



7.4 Formulasi Digitalisasi Good Corporate Governance Berbasis Political Economy of Accounting Untuk Mencapai Enviromental Excellency

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik berbasis ekonomi politik akuntansi untuk mencapai keunggulan lingkungan, dilakukan analisis data kualitatif dalam bentuk kajian pustaka dengan menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus. Word cloud merupakan visualisasi yang menampilkan kata-kata dari suatu teks, dengan ukuran font yang lebih besar untuk kata-kata yang lebih sering muncul dalam teks. Jika diurutkan dari kata terbesar ke terkecil, maka kata-kata tersebut adalah sebagai berikut: "lingkungan, tata kelola, politik, ekonomi, akuntansi dan politik". Analisis data diawali dengan analisis frekuensi kemunculan kata atau word cloud seperti yang divisualisasikan pada Gambar 1.



Gambar 7.1: Word Cloud of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence using Noivo 12 Plus

Source: Authors' own research

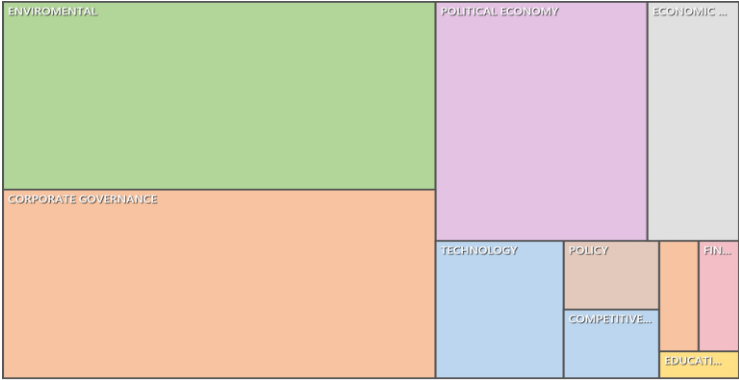
Berdasarkan hasil query frekuensi kata, ditemukan bahwa kata “lingkungan” merupakan kata yang paling sering muncul dalam data, yaitu sebanyak 193 kali atau 3,5%, diikuti oleh kata “pemerintahan” sebanyak 173 kali atau 3%, “politik” sebanyak 69 kali atau 1,3%, “ekonomi” sebanyak 49 kali atau 1%, “akuntansi” sebanyak 32 kali atau 0,6%, dan kata “politik” sebanyak 31 kali atau 0,6%. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan kata ‘pemerintahan’ yang merupakan kata dominan dari berbagai sumber data penelitian yang dikumpulkan. Hasil pencarian disajikan dalam Word Tree sebagai berikut:



Gambar 7.2: Word Tree of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence using Noivo 12 Plus
Source: Authors' own research

Diagram pohon kata di atas menjelaskan bahwa digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan ekonomi politik akuntansi dan keunggulan lingkungan, merupakan proses multifaset yang melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam organisasi. Alat dan teknik digital memainkan peran penting dalam mentransformasi operasi keuangan, yang mengarah pada peluang strategis bagi perusahaan (Liu et al., 2024). Transformasi ini tidak hanya memengaruhi operasi internal tetapi juga pemangku kepentingan, yang menekankan tujuan jangka panjang dan penciptaan nilai yang berkelanjutan (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016). Lebih jauh, dampak digitalisasi pada praktik tata kelola perusahaan signifikan, memungkinkan aliran informasi yang lebih transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan melalui teknologi canggih seperti analisis data besar dan kecerdasan buatan (Benavides et al., 2023). Selain itu, hubungan antara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan akuntansi hijau telah ditemukan memengaruhi kinerja lingkungan secara positif, yang menyoroti pentingnya struktur tata kelola dalam mendorong keunggulan lingkungan di perusahaan manufaktur (Li & Zhao, 2024). Integrasi perangkat digital ke dalam prosedur tata kelola perusahaan menawarkan manfaat seperti efisiensi, penghematan biaya, dan kemudahan, yang menekankan perlunya menyeimbangkan pendekatan digital dan nondigital untuk tata kelola yang efektif (Lazor et al., 2024;

Ma et al., 2023; Yang & Jin, 2024). Secara keseluruhan, konvergensi digitalisasi, tata kelola yang baik, dan keunggulan lingkungan menggarisbawahi keterkaitan teknologi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis modern (Wang et al., 2024).

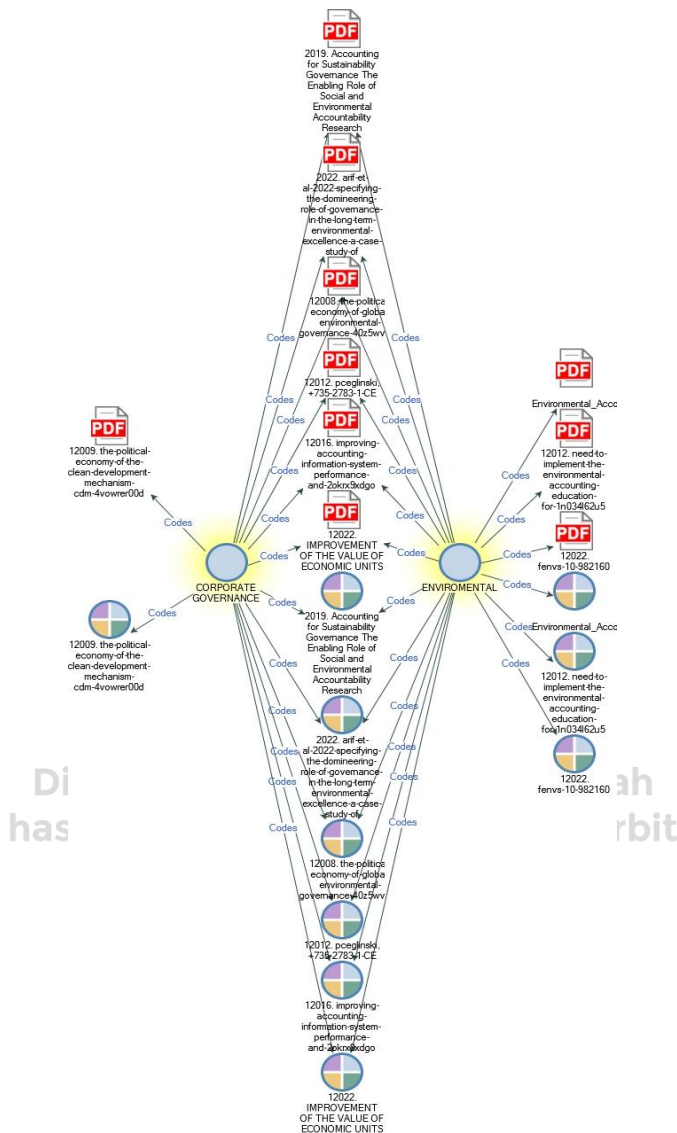


Gambar 7.3: Hierarchy Chart of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence using Nvivo 12 Plus

Source: Authors' own research

Peta proyek mengacu pada hasil pengkodean yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menyajikan hubungan data. Berdasarkan peta proyek, diperoleh informasi bahwa formulasi digitalisasi tata kelola perusahaan berbasis ekonomi politik akuntansi yang diterapkan melalui kebijakan kepemimpinan akan paling dominan mendorong pencapaian keunggulan lingkungan. Transformasi digital tata kelola perusahaan, yang didorong oleh teknologi seperti blockchain dan AI, memiliki implikasi signifikan bagi model bisnis, struktur organisasi, dan kerangka regulasi (Li & Zhao, 2024).

Transformasi digital secara signifikan meningkatkan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) perusahaan, terutama aspek lingkungan dan sosial, dengan efek yang lebih nyata pada perusahaan dengan kendala pembiayaan rendah, perusahaan swasta, dan perusahaan non-teknis (Yang & Jin, 2024). Ekonomi digital memainkan peran penting dalam mengekang perilaku greenwashing melalui transparansi informasi dan pengawasan eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, tanggung jawab sosial, dan profitabilitas (Lazor et al., 2024; Ma et al., 2023; Wang et al., 2024). Selain itu, perkembangan keuangan digital secara signifikan meningkatkan investasi hijau perusahaan, berkontribusi pada pergeseran ke arah model pembangunan hijau dan berkualitas tinggi yang lebih mengandalkan kemajuan teknologi dan peningkatan efisiensi (Rachinger et al., 2019). Oleh karena itu, perumusan digitalisasi tata kelola perusahaan, yang berbasis pada akuntansi ekonomi politik dan kebijakan kepemimpinan, memang dapat mendorong keunggulan lingkungan dan meningkatkan kinerja keuangan, meskipun memerlukan proses pendidikan yang panjang bagi semua anggota organisasi untuk mewujudkan manfaat tersebut. Selain itu, hal itu juga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mewujudkannya diperlukan waktu yang cukup karena dalam implementasinya merupakan proses pendidikan bagi semua anggota organisasi.



Gambar 7.4: Comparison Diagrams of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting and Environmental Excellency using Nvivo 12 Plus
Source: Authors' own research

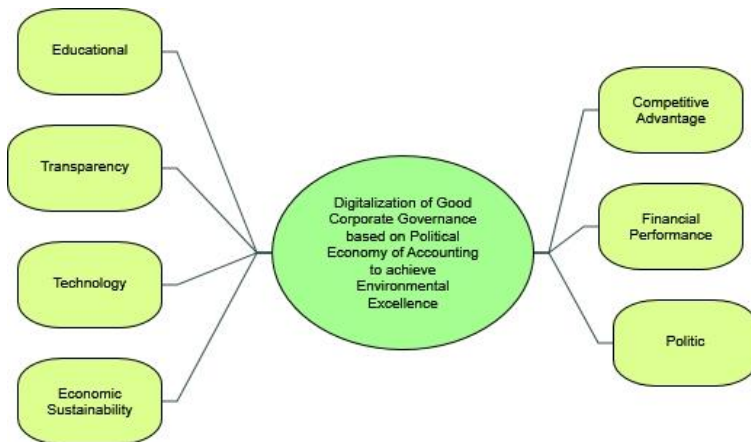
Digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik melibatkan integrasi perangkat dan teknik digital untuk meningkatkan operasi keuangan dan kebijakan kepatuhan, yang menekankan pentingnya digitalisasi secara strategis (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016). Transformasi ini khususnya penting dalam konteks kinerja lingkungan, di mana faktor-faktor seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan akuntansi hijau memengaruhi praktik lingkungan dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan (Hoang & Wiegratz, 2023). Lebih jauh, peran akuntansi dalam tata kelola perusahaan di bank-bank komersial milik negara di negara-negara berkembang menyoroti dinamika kelembagaan dan sosial-politik yang memengaruhi mekanisme tata kelola, yang menunjukkan bagaimana kepatuhan sering kali didorong oleh kebutuhan akan legitimasi daripada perbaikan tata kelola yang sesungguhnya. Memahami kompleksitas digitalisasi dalam tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap keunggulan lingkungan sangat penting untuk menavigasi lanskap operasi bisnis dan praktik keberlanjutan yang terus berkembang (Ma et al., 2023). Digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dibahas dalam berbagai makalah penelitian, melibatkan pentingnya digitalisasi yang strategis dalam operasi keuangan (Jacobs, 2017), peran moderasi akuntansi manajemen lingkungan (EMA) yang didukung secara digital dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan, dan dinamika kelembagaan dan sosial-politik akuntansi dalam tata

kelola perusahaan di negara-negara berkembang. Studi-studi ini menyoroti kompleksitas dan interaksi antara perangkat digital, keberlanjutan lingkungan, dan praktik tata kelola. Selain itu, sifat politik-ideologis dari reformasi tata kelola perusahaan dan normativitasnya dibahas, dengan menekankan asumsi dan dampak yang dipertanyakan dari reformasi tersebut (Hoang & Wiegratz, 2023; Liu et al., 2024; Plekhanov et al., 2023; Ramadhani et al., 2023). Lebih jauh lagi, evolusi dan divergensi sistem tata kelola perusahaan nasional, khususnya yang dipengaruhi oleh pasar saham, menunjukkan perubahan lanskap model tata kelola secara global (Lazor et al., 2024; Ma et al., 2023).

Digitalisasi memainkan peran penting dalam meningkatkan tata kelola perusahaan untuk keunggulan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital secara signifikan meningkatkan tata kelola hijau perusahaan untuk setiap peningkatan unit dalam transformasi digital. Ekonomi digital memberdayakan Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial, dengan mengurangi kendala pembiayaan dan mempromosikan pembangunan ekonomi hijau. Selain itu, digitalisasi meningkatkan kinerja tata kelola lingkungan dengan meningkatkan regulasi lingkungan pemerintah, partisipasi lingkungan publik, dan inovasi teknologi hijau perusahaan, yang berkontribusi pada sistem tata kelola lingkungan multi-tata kelola (Wang et al., 2024). Namun, tantangan seperti ancaman dunia maya, pelanggaran data,



dan kepatuhan peraturan harus ditangani untuk memaksimalkan manfaat implementasi digital dalam tata kelola perusahaan (Rachinger et al., 2019). Di sektor keuangan, pentingnya strategis digitalisasi disorot, yang menekankan perlunya tata kelola yang baik untuk mendukung proses transformasi secara efektif.



Gambar 7.5: Mind Map of Digitalization of Good Corporate Governance Based on the Political Economy of Accounting to Achieve Environmental Excellence Using Nvivo 12 Plus

Source: Authors' own research

Digitalisasi tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mencapai keunggulan lingkungan, merupakan proses multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mengintegrasikan ekonomi digital dengan praktik Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Perusahaan (ESG) perusahaan dapat meningkatkan kinerja ESG secara signifikan, khususnya dalam aspek lingkungan dan sosial (Ramadhani et al., 2023).

Transformasi ini memerlukan penyesuaian strategis dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, karena fungsi keuangan sangat dipengaruhi oleh digitalisasi, yang membutuhkan kebijakan kepatuhan berdasarkan standar tata kelola perusahaan. Akuntansi dan pelaporan perusahaan memainkan peran penting dalam transformasi digital ini, menghubungkan organisasi dengan para pemangku kepentingan melalui restrukturisasi data yang efisien dan komunikasi penciptaan nilai dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016; Hoang & Wiegratz, 2023; Plekhanov et al., 2023). Namun, efektivitas akuntansi dalam tata kelola dapat terhambat oleh kompleksitas sosial-politik, di mana kepatuhan sering kali didorong oleh kebutuhan akan legitimasi daripada peningkatan praktik tata kelola. Dengan memanfaatkan perangkat dan kerangka kerja digital seperti estimasi HDMap daring, perusahaan dapat lebih mengoptimalkan upaya lingkungan dan efisiensi operasional mereka, yang menunjukkan potensi solusi digital untuk mendorong keunggulan lingkungan dalam lanskap tata kelola perusahaan (Benavides et al., 2023). Untuk mencapai keunggulan lingkungan melalui e-pemerintahan berdasarkan ekonomi politik akuntansi, penting untuk mempertimbangkan interaksi antara struktur tata kelola, kinerja keuangan, dan kebijakan lingkungan (Dziatkovskii A. et al., 2021). Menekankan pentingnya efektivitas, suara dan akuntabilitas pemerintah, dan kualitas regulasi dalam mengekang degradasi lingkungan, menyoroti pentingnya lembaga



yang kuat dan langkah-langkah antikorupsi. Selain itu, Nedergaard (Jacobs, 2017) menekankan perlunya sistem tata kelola yang sah dan efisien dalam inisiatif lingkungan, yang memastikan penerimaan luas dan biaya transaksi minimal. Lebih lanjut, Sakhil (Wang et al., 2024) menggarisbawahi dampak struktur tata kelola pada pengungkapan akuntansi lingkungan, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan lingkungan dapat memoderasi hasil keuangan menuju penilaian perusahaan. Dengan mengintegrasikan wawasan ini, strategi e-pemerintahan dapat memanfaatkan prinsip ekonomi politik untuk meningkatkan keberlanjutan dan kinerja lingkungan.

E-governance berperan penting dalam membentuk kebijakan lingkungan dalam akuntansi dengan memengaruhi berbagai aspek tata kelola lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan e-government yang memanfaatkan teknologi dapat berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan, seperti peningkatan produksi limbah elektronik (Jacobs, 2017; Oliveira, 2018; Ramadhani et al., 2023). Sebaliknya, pengembangan keuangan digital telah terbukti berdampak positif pada tata kelola lingkungan perkotaan dengan mengurangi emisi polutan, khususnya di kota-kota dengan tingkat pengembangan keuangan hijau yang lebih tinggi (Liu et al., 2024; Plekhanov et al., 2023; Ramadhani et al., 2023). Selain itu, pengenalan platform otomatis digital dalam entitas ekonomi dapat berkontribusi pada penghijauan kegiatan dan

pembentukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui solusi manajemen lingkungan. Lebih jauh, sistem akuntansi manajemen lingkungan disorot sebagai hal yang penting untuk memastikan tata kelola perusahaan yang efektif dan menyediakan informasi untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan hubungan pemangku kepentingan (Febriyanti, K., & Sukoharsono, 2016). Secara keseluruhan, e-pemerintahan memengaruhi kebijakan lingkungan dalam akuntansi melalui berbagai dampaknya terhadap keberlanjutan, manajemen keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Alat e-pemerintahan memainkan peran penting dalam memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan lingkungan dengan meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi proses tata kelola. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam administrasi publik dipandang sebagai strategi inovatif untuk pengambilan keputusan yang efektif dan manajemen yang optimal (Benavides et al., 2023; Li & Zhao, 2024; Yang & Jin, 2024). Alat-alat ini, seperti pemetaan partisipatif dan platform e-partisipasi, memfasilitasi keterlibatan publik dalam tata kelola lingkungan, yang memungkinkan warga berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan mengatasi masalah rasionalitas terbatas dalam sistem tata kelola perkotaan (Lazor et al., 2024; Wang et al., 2024). Selain itu, adopsi platform e-pemerintahan dipengaruhi oleh ekspektasi publik, kegunaan yang dirasakan, dan harapan upaya, yang menyoroti pentingnya persepsi pengguna



dalam mendorong perilaku adopsi. Secara keseluruhan, mekanisme e-pemerintahan dapat mengarah pada struktur pemerintahan yang lebih efektif, peningkatan efektivitas kebijakan, dan pada akhirnya berkontribusi pada proses pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan akuntabilitas dalam tata kelola Alat tata kelola elektronik menawarkan banyak keuntungan dalam kebijakan lingkungan, termasuk transparansi, efisiensi, aksesibilitas, pengurangan korupsi, penghematan biaya, inovasi, dan pelestarian lingkungan (Rachinger et al., 2019). Alat-alat ini memungkinkan publik untuk mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, dan memantau isu-isu lingkungan secara efektif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan pemberian layanan publik, mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Selain itu, tata kelola elektronik memfasilitasi pengembangan ekonomi elektronik, yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses tata kelola. Lebih jauh lagi, penggunaan alat-alat digital dalam tata kelola lingkungan dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kepercayaan publik, dan penerapan praktik-praktik ramah lingkungan. Prosedur tata kelola perusahaan beralih ke platform digital. Menyeimbangkan pendekatan digital dan non-digital sangat penting bagi tata kelola. Ekonomi digital akan secara signifikan

meningkatkan kinerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola perusahaan, khususnya lingkungan dan sosial. Ekonomi digital terintegrasi dengan tata kelola perusahaan melalui pembiayaan dan pembangunan ekonomi ramah lingkungan. Ekonomi digital secara signifikan meningkatkan kinerja ESG perusahaan, khususnya lingkungan dan sosial. Ekonomi digital terintegrasi dengan tata kelola perusahaan melalui pembiayaan dan pembangunan hijau.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**





BAB 8

INTEGRASI DIGITALISASI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN LINGKUNGAN

Dilarang keras, mencetak naskah hasil layout ini tanpa seijin Penerbit

8.1 Sinergi antara Digitalisasi dan Good Corporate Governance

Digitalisasi dan Good Corporate Governance (GCG) adalah dua elemen penting dalam pengelolaan organisasi modern. Digitalisasi merujuk pada proses mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, sedangkan GCG adalah praktik tata kelola yang baik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Sinergi

antara keduanya dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

- Peningkatan Transparansi
 - Digitalisasi:
 - Penggunaan platform digital untuk melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan secara real-time.
 - Implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaporan yang transparan.
 - GCG: Prinsip transparansi adalah salah satu pilar utama GCG. Dengan adanya digitalisasi, informasi yang relevan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan lebih mudah.
 - Sinergi: Digitalisasi mendukung prinsip transparansi GCG dengan menyediakan data yang akurat dan terkini, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
- Akuntabilitas yang Lebih Baik
 - Digitalisasi:
 - Alat digital memungkinkan pelacakan dan pemantauan aktivitas perusahaan secara lebih efektif.
 - Sistem audit digital dapat memberikan laporan yang lebih cepat dan akurat.
 - GCG: Akuntabilitas adalah kunci dalam GCG, di mana manajemen bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan.



- Sinergi: Digitalisasi meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan jejak audit yang jelas dan data yang dapat diakses, memudahkan penilaian kinerja manajerial.
- Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data
 - Digitalisasi: Penggunaan analitik data dan big data untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan.
 - GCG: GCG menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan.
 - Sinergi: Digitalisasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terinformasi, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Peningkatan Efisiensi Operasional
 - Digitalisasi: Automatisasi proses bisnis dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
 - GCG: GCG mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab.
 - Sinergi: Digitalisasi membantu perusahaan mencapai efisiensi yang lebih tinggi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dalam penggunaan sumber daya.
- Inovasi Berkelanjutan
 - Digitalisasi: Teknologi digital mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan proses.

- GCG: GCG mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi demi keberlanjutan.
- Sinergi: Sinergi antara digitalisasi dan GCG menciptakan budaya inovasi yang berkelanjutan, membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar.
- Manajemen Risiko yang Lebih Baik
 - Digitalisasi: Sistem manajemen risiko berbasis digital yang memanfaatkan analitik untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko.
 - GCG: GCG menekankan pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.
 - Sinergi: Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko lebih awal dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat, sejalan dengan prinsip GCG.
- Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - Digitalisasi: Platform digital untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat.
 - GCG: Keterlibatan pemangku kepentingan adalah prinsip penting dalam GCG, memastikan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan.
 - Sinergi: Digitalisasi memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan, memberikan sarana untuk umpan balik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.



Sinergi antara digitalisasi dan Good Corporate Governance menciptakan lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat meningkatkan praktik GCG-nya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi, kepuasan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan jangka panjang. Integrasi ini bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

8.2 Rekomendasi untuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi masyarakat. Rekomendasi untuk kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan yang dapat diambil dalam merumuskan rekomendasi kebijakan publik:

- Identifikasi Masalah
 - Analisis Situasi: Lakukan analisis mendalam tentang isu yang ingin diatasi. Gunakan data dan statistik untuk memahami skala dan dampak masalah.
 - Konsultasi Publik: Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi masalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

- Penetapan Tujuan Kebijakan
 - Tujuan Jelas: Tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan kebijakan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, atau melindungi lingkungan.
 - Indikator Keberhasilan: Buat indikator yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
- Pengembangan Solusi dan Alternatif Kebijakan
 - Studi Kasus: Teliti kebijakan yang telah diterapkan di tempat lain yang relevan dan analisis keberhasilan serta kegagalannya.
 - Alternatif Solusi: Kembangkan beberapa alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif.
- Analisis Dampak
 - Dampak Sosial: Taksir dampak sosial dari kebijakan, termasuk efek pada kelompok rentan.
 - Dampak Ekonomi: Analisis dampak ekonomi, termasuk biaya implementasi dan manfaat jangka panjang.
 - Dampak Lingkungan: Pertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan yang diusulkan.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan
 - Partisipasi Aktif: Libatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, dalam proses perumusan kebijakan.



- Umpan Balik: Kumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk menyempurnakan kebijakan yang diusulkan.
- Implementasi Kebijakan
 - Rencana Aksi: Buat rencana aksi yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan, termasuk jadwal dan tanggung jawab.
 - Sumber Daya: Identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk implementasi, termasuk anggaran dan tenaga kerja.
- Monitoring dan Evaluasi
- Sistem Monitoring: Kembangkan sistem untuk memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala.
- Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi dampak untuk menilai apakah kebijakan mencapai tujuan yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- Transparansi dan Akuntabilitas
 - Pelaporan Publik: Pastikan bahwa informasi tentang kebijakan, proses, dan hasil evaluasi tersedia untuk publik.
 - Akuntabilitas: Tetapkan mekanisme untuk memastikan bahwa pengambil keputusan bertanggung jawab atas hasil kebijakan.
- Penggunaan Teknologi
 - Digitalisasi Proses: Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data, analisis, dan komunikasi kebijakan.

- Platform Partisipatif: Gunakan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses kebijakan.
- Inovasi dan Adaptasi
 - Pendekatan Fleksibel: Bersiaplah untuk mengadaptasi kebijakan berdasarkan umpan balik dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
 - Inovasi Berkelanjutan: Dorong inovasi dalam pengembangan kebijakan untuk menangani masalah yang muncul dengan cara yang baru dan efektif.

Rekomendasi untuk kebijakan publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam, keterlibatan pemangku kepentingan yang luas, dan pendekatan yang transparan. Melalui proses ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Implementasi yang baik, bersama dengan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, akan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan tantangan di masa depan.

8.3 Masa Depan Good Corporate Governance dalam Era Digital

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan dikendalikan. Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

membawa perubahan signifikan dalam praktik GCG. Berikut adalah beberapa aspek penting yang akan membentuk masa depan GCG dalam konteks digital.

- Transformasi Digital dan GCG
 - Adopsi Teknologi: Perusahaan semakin mengadopsi teknologi digital, seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan.
 - Sistem Manajemen Digital: Implementasi sistem manajemen yang berbasis digital memudahkan pelacakan informasi, audit, dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat.
- Transparansi dan Aksesibilitas Informasi
 - Pelaporan Berbasis Data: Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan laporan yang lebih transparan dan terperinci mengenai kinerja keuangan dan non-keuangan.
 - Platform Digital: Informasi dapat diakses secara real-time oleh pemangku kepentingan, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan.
- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik
 - Analitik dan Big Data: Penggunaan analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat.
 - AI dalam Pengelolaan Risiko: Kecerdasan buatan dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara lebih efektif.
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan

- Interaksi Digital: Platform digital memungkinkan pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
 - Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat melalui media sosial dan platform online dapat meningkatkan transparansi dalam kebijakan perusahaan.
- Keamanan Data dan Privasi
 - Tantangan Keamanan Siber: Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, perusahaan harus menghadapi risiko terkait keamanan data dan privasi.
 - Kepatuhan terhadap Regulasi: Perusahaan perlu memastikan bahwa praktik mereka mematuhi regulasi perlindungan data, seperti GDPR di Eropa.
- Inovasi dan Adaptasi
 - Budaya Inovasi: GCG harus mendorong perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan digital.
 - Fleksibilitas: Struktur tata kelola perlu fleksibel untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul dari transformasi digital.
- Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
 - Keterampilan Digital: Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk mendukung GCG yang efektif.



- Kesadaran Keamanan: Meningkatkan kesadaran tentang praktik keamanan siber di antara karyawan untuk melindungi informasi perusahaan.
- Regulasi dan Kebijakan
 - Peningkatan Regulasi: Pemerintah dan badan regulasi mungkin akan memperkenalkan peraturan baru yang mengatur praktik GCG dalam konteks digital.
 - Standar Internasional: Perusahaan perlu mengikuti standar internasional yang berkaitan dengan GCG dan keberlanjutan di era digital.
- Sustainability dan Tanggung Jawab Sosial
 - Integrasi Keberlanjutan: GCG di era digital harus memasukkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam strategi perusahaan.
 - Pelaporan Keberlanjutan: Perusahaan akan semakin diminta untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka secara transparan.

Masa depan Good Corporate Governance dalam era digital akan ditandai oleh integrasi teknologi yang mendalam, peningkatan transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih besar. Meskipun ada tantangan, seperti keamanan data dan compliance, peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas juga sangat signifikan. Perusahaan yang dapat beradaptasi dengan perubahan ini akan mampu menciptakan nilai jangka panjang dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan di pasar yang semakin kompetitif.



www.penerbitbukumurah.com

**Dilarang keras, mencetak naskah
hasil layout ini tanpa seijin Penerbit**



DAFTAR PUSTAKA



- Akerlof, G. A. (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. *Quarterly Journal of Economics*.
- Allen, F., & Gale, D. (2000). *Comparative Financial Systems: A Survey*. In Handbook of Financial Intermediation and Banking.
- Baker, H. K., & Anderson, R. (2010). *Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice*. Wiley.
- Barnejee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
- Beasley, M. S., & Petroni, K. R. (2001). The Role of the Audit Committee in Corporate Governance. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Bernstein, P. L. (1996). *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*. Wiley.
- Bhaduri, S. N., & Haque, M. (2014). Political Economy of Corporate Governance in India. *Journal of Political Economy*.

- Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance. *Journal of Corporate Finance*.
- Campbell, J. Y. (1996). Stock Returns and the Term Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Cohen, J., & Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Control: The Role of the Audit Committee. *The Journal of Economic Perspectives*.
- Dechow, P., & Dichev, I. D. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Evidence from the Stock Market. *Accounting Review*.
- Dodd, P. (2004). The Role of the Accountant in the Corporate Governance Process. *Journal of Business Ethics*.
- Eccles, R. G., & Klimenko, S. (2019). *The Role of the CFO in Corporate Governance*. Harvard Business Review.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. *Journal of Financial Economics*.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*.
- Ghosh, A., & Ghosh, A. (2006). Political Economy of Corporate Governance. *Journal of Economic Issues*.
- Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate Governance and Equity Prices. *Quarterly Journal of Economics*.
- Hail, L., & Leuz, C. (2006). International Differences in the Cost of Equity Capital: Do Legal Institutions and



- Securities Regulation Matter? *Journal of Business Finance & Accounting*.
- Hill, C. W. L., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-Agency Theory. *Journal of Management Studies*.
- Hoskisson, R. E., & Hitt, M. A. (1994). Downsizing in the Firm: An Empirical Examination of the Impact on Corporate Governance. *Academy of Management Journal*.
- Jensen, M. C. (2001). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. *Business Ethics Quarterly*.
- Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*.
- Kothari, S. P., & Lester, R. (2012). The Role of Accounting in Corporate Governance. *Journal of Accounting Research*.
- Kraakman, R. (2001). *Corporate Law and Governance*. Harvard Law Review.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2006). What Works in Securities Laws? *Journal of Finance*.
- McKinsey & Company. (2000). *Corporate Governance: The McKinsey Global Investor Opinion Survey*.
- Miller, M. H. (1991). Financial Innovation and Economic Performance. *Journal of Financial Services Research*.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. *American Economic Review*.

- O'Sullivan, N. (2000). The Relationship Between Corporate Governance and Financial Performance. *European Financial Management*.
- OECD. (2004). *Principles of Corporate Governance*.
- Porter, M. E. (1996). What is Strategy? *Harvard Business Review*.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (2001). The Firm as a Dedicated Hierarchy: A Theory of Corporate Finance. *The Journal of Financial Economics*.
- Rezaee, Z. (2009). *Corporate Governance and Ethics*. Wiley.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *Quarterly Journal of Economics*.
- Tirole, J. (2006). *The Theory of Corporate Finance*. Princeton University Press.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Theory of Accounting. *The Accounting Review*.
- Wilson, R. (2012). *Corporate Governance: A Practical Guide to the Law and Governance of Public and Private Companies*. Kogan Page.
- Young, J. J., & O'Byrne, S. F. (2001). The Value of Corporate Governance. *Financial Analysts Journal*.
- Zingales, L. (2000). In Search of New Foundations. *The Journal of Finance*.

PROFIL PENULIS



GAGUK APRIYANTO

Lecturer

University of Merdeka Malang

gaguk.apriyanto@unmer.ac.id



Dr. Drs. Gaguk Apriyanto, S.E, M.Si. is a lecturer at Merdeka University Malang. He is known for his expertise in the field of Management Accounting. For many years he has written and researched management accounting in both the private and

public sectors. In terms of book writing, he has produced a book entitled Pension Fund Management: A Modified Baldrige Assessment Performance Assessment Approach. Apart from his achievements in the academic field, especially management accounting, Dr. Gaguk is also known as the testing team for the Actualization of Civil Servant Candidates and the Eligibility and Competency of the Perumda Supervisory Board. He is also the Head of the Team that Prepares Good Pension Fund Governance.

FAJAR SUPANTO

Lecturer

University of Merdeka Malang

Fajar.supanto@unmer.ac.id



Prof. Dr. Fajar Supanto, S.E., M.Si. He earned his Bachelor of Economics degree from Universitas Merdeka Malang in 1992, a Master of Science from Universitas Airlangga in 1998, and a Doctorate from Universitas Negeri Malang in 2012.

Since 1993, he has been a permanent lecturer at the Faculty of Economics and Business, Universitas Merdeka Malang. Currently, he serves as a Professor in Human Resource Management. In addition to teaching, Fajar is active as a consultant in entrepreneurship and the creative industry. Over the past three years, he has secured several intellectual property rights and published various articles in international journals. His awards include recognition as a Digital Creative Industry Activist from the Governor of East Java in 2018.

ILHAM Z SALE

Lecturer

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Makasar

ilhamsalle33@gmail.com



Dr. Ilham Z. Salle, S.E., M.Sc., Ak is a lecturer at the Indonesian Economic College, Makassar. He is an expert in public sector accounting. In recent years, he has written and researched Sharia accounting. His written works and research include The Relationship Between Socioeconomic Factors and Household Income Levels in Coastal and Island Communities in South Sulawesi, The Concept of Accountability Based on the Value of Islamic Justice and Manuntungi Accountability: Interpreting Kalambusang Values in the Ammatoa Customary Zakat Institution. Several books that have been written and published include Accountability of Zakat Institutions and Introduction to Accounting: Theory and Practice.

BOGE TRIATMANTO

Lecturer

University of Merdeka Malang

boge.triatmanto@unmer.ac.id



Prof. Dr. Boge Triatmanto, S.E., M.M. is a lecturer in the Department of Management, Faculty of Economics and Business, Merdeka University, Malang. He is famous for his abilities in the field of Human Resources Management. As a Management expert, he always maintains consistent research in his field. For several years he has written and researched Management, especially Human Resources Management. Apart from that, he is also active as a consultant in the fields of empowerment and socio-economics. Apart from that, Prof. Boge also has a wealth of experience in the field of theoretical and practical empowerment.



SYARIF HIDAYATULLAH

Lecturer

University of Merdeka Malang

syarif.hidayatullah@unmer.ac.id



Dr. Syarif Hidayatullah, S.E., M.M. is a lecturer at University of Merdeka Malang. He is known for his expertise in management information systems and tourism information systems. Over the years, he has written and researched about tourism such as tourism in Malang City, Batu City, Labuan Bajo and other cities. In terms of writing books, he has also produced books including the book Tourism Research Methodology, Tourism Destination Profile of Batu City, Overview of Tourism Destinations in Malang City and management information systems of Hot FIT and World Online Shop. In addition to his achievements in literature, Dr. Syarif is also known as an expert in several fields and activities. His research mainly focuses on the practice of tourism information systems practically and theoretically, with an emphasis on relationships and influences as well as strategies in tourism development.

HARMONO

Lecturer

University of Merdeka Malang

harmono@unmer.ac.id



Dr. Harmono is an Associate Professor of Financial Management and Capital Market Investment at the Faculty of Economics and Business, University of Merdeka Malang, Indonesia. Obtained Bachelor's Degree in Accounting from the University of Merdeka, Malang, and Master's Degree from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1996, and Doctorate Degree from the University of Merdeka in 2004, Malang. Dr. Harmono specializes in risk management, corporate governance, intellectual capital and optimal capital structure. Has written several articles for journals and research interest is in this area of finance and banking. Papers in international reputable journals include International Symposia in Economic Theory and Econometrics, International Journal of learning and Intellectual Capital. In practice as a Consultant of Government in Indonesia about Regional Innovation System.



SUFIYANTO

Lecturer

University of Merdeka Malang

Sufiyanto @unmer.ac.id



Sufiyanto is received his Master's degree from Brawijaya University, Malang in 2009. He is a Lecturer in the Department of Mechanical Engineering, University of Merdeka Malang. He specializes in machine design and structure analysis and he has actively written some articles for national journals and his research interest is in the area of vibration and structure analysis, and design engineering. He also focuses on community service programs for community empowerment and improvement of the village environment in the city of Malang, Indonesia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5044-8634>

SARI YUNIARTI

Lecturer

Universitas Merdeka Malang

sari.yuniarti@unmer.ac.id



Sari Yuniarti adalah Dosen Keuangan dan Perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang, Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Merdeka Malang, dan gelar Magister dari Universitas

Brawijaya Malang, serta gelar Doktor dari Universitas Merdeka Malang. Dr. Sari Yuniarti berspesialisasi dalam manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan stabilitas keuangan. Ia telah menulis beberapa artikel untuk jurnal dan minat penelitiannya di bidang keuangan dan perbankan. Dia telah menerbitkan banyak makalah di jurnal terkemuka termasuk Cogent Economics and Finance, International Journal of Business and Society, dan International Journal of Business. Beliau aktif terlibat dalam program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan dan memperbaiki lingkungan desa-desa di kota Malang, Indonesia.

MOH. FAHRIAL AMRULLA

Lecturer

University of Merdeka Malang

fahrial.amrulla@unmer.ac.id



Moh. Fahrial Amrulla, is a lecturer at the Faculty of Law, Merdeka University Malang. He obtained a law degree from Merdeka University Malang, a Master's degree from Brawijaya University Malang, and currently pursuing a Doctoral degree in Law at Brawijaya University Malang. He is also an Intellectual Property Consultant Republic Indonesia with registration number 537-2011. He is an expert in civil economic law, especially intellectual property. The theme of His dissertation is traditional cultural expressions in copyright law in Indonesia. He wrote several scientific articles which have been published in reputable national journals.